

**TINJAUAN YURIDIS PERATURAN DAERAH (PERDA) No. 7 TAHUN  
2014 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DI  
KABUPATEN ENREKANG**



**Skripsi**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Ilmu hukum  
(S.H) Jurusan Ilmu hukum Fakultas syariah dan hukum UIN Alauddin Makassar



**INGRID CHAMINRA**

**10400116074**

**JURUSAN ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS NEGERI ISLAM ALAUDDIN MAKASSAR**

**2020**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI



Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ingrid Chaminra  
Nim : 10400116074  
Tempat/Tgl. Lahir : Tanjung Redep, 25 April 1998  
Jurusan : Ilmu Hukum  
Fakultas : Syariah dan Hukum  
Alamat : JL. Sultan Alauddin No. 3  
Judul : **Tinjauan Yuridis Peraturan Daerah (PERDA) No 7 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah di Kabupaten Enrekang**

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Gowa, 28 Juli 2020

Penyusun,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'INGRID CHAMINRA'.

**INGRID CHAMINRA**

**NIM : 10400116074**

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “**Tinjauan Yuridis Peraturan Daerah ( Perda) No 7 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Di Kabupaten Enrekang** yang disusun oleh Ingrid Chaminra, Nim 10400116074, mahasiswa jurusan Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertanggungjawabkan pada sidang *Munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 23 Juli 2020, dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Alauddin Makassar dengan beberapa perbaikan.

Makassar, 28 Juli 2020 M  
7 Dzulhijjah 1441 H

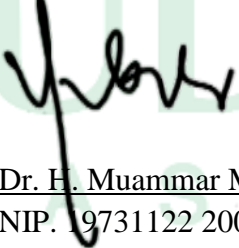
### DEWAN PENGUJI

|               |   |
|---------------|---|
| Ketua         | : Dr. H. Muammar Muhammad Bakry, Lc., M. Ag. (  ) |
| Sekretaris    | : Dr. H. Muh. Saleh Ridwan, M.Ag (  )             |
| Munaqisy I    | : Prof. Dr. H. Kasjim, M. Th.I. (  )             |
| Munaqisy II   | : Dr. Andi Safriani, S.H., M.H. (  )             |
| Pembimbing I  | : Ahkam Jayadi, S.H., M.H. (  )                  |
| Pembimbing II | : Ashar Sinilele, S.H., M.H. (  )                |

Diketahui Oleh:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Alauddin Makassar

  
Dr. H. Muammar Muhammad Bakry, Lc., M.Ag.  
NIP. 19731122 200012 1 002

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatu...

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT. Atas berkat karunia iman, islam dan ihsan terlebih lagi nikmat kesehatan sehingga penulis dapat merampungkan penulisan skripsi sebagai salah satu bentuk pencapaian gelar sarjana jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Salawat beserta salam semoga tetap terhanturkan kepada Nabi jujungan besar kita Nabi Muhammad SAW ialah Nabi yang telah membawa kita dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang menerang, ia pula Nabi yang membawa perubahan dari zaman biadab ke zaman yang beradab juga satu-satunya kekasih Allah SWT yang memiliki tempat istimewa di persadaNya.

Tanpa mengurangi rasa syukur dan terima kasih penulis menyadari bahwa penulisan skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Di Kabupaten Enrekang”.

Maka dari itu dengan rasa kasih yang dititipkan Allah SWT kepada penulis, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang telah banyak membantu dalam penyusunan skripsi sampai rampung seperti ini. Terutama penulis ucapkan banyak terima kasih kepada **Ayahanda tersayang Abdul Majid dan Ibunda tersayang Yulien Maydangkai** yang memiliki peran penting sampai penulisan skripsi ini selesai. Tersadar untuk penulis jika tak ada sentuhan tangan kasih sayang kalian maka tak ada arti apapun yang dilakukan. Doa yang kalian hanturkan sungguh menjadi obat semangat penulis, sekali lagi penulis ucapkan banyak terima kasih untuk ayah dan bunda.

Tak lupa penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Hamdan Juhannis, MA., Ph.D. Sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Beserta Wakil Rektor I Prof. Dr. H. Mardan, M. Ag. Wakil Rektor II Dr. Wahyuddin, M. M.Hum. Wakil Rektor III Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin M. Ag. Wakil Rektor IV Dr. H. Kamaluddin A. Nawas, M. Ag. UIN Alauddin Makassar.
2. Dr . H. Muammar Muhammad Bakry, Lc., M.Ag, Dekan beserta Wakil Dekan I Dr. Hj. Rahmatiah HI., M.Pd. Bidang Akademik, Wakil Dekan II Dr. Marilang, S.H., M.Hum. Bidang Administrasi Umum, dan Wakil Dekan III H. Muh. Saleh Ridwan, M.Ag. Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Alauddin Makassar.
3. Dr. Rahman Syamsuddin, S.H., M.H. Ketua Jurusan dan Abdul Rais Asmar, S.H., M.H., Sekretaris Jurusan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar
4. Ahkam Jayadi, S.H., M.H. Sebagai Pembimbing I, dan Ashar Sinilele S.H., M.H. Sebagai Pembimbing II, Yang meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan petunjuk, nasihat dan motifasi hingga terselesaikan penulisan skripsi ini.

5. Prof. Dr. H. Kasjim, S.H., M. TH.I. Sebagai Penguji I, dan Dr. Andi Safriani, S.H., M.H. sebagai Penguji II, Telah memberikan nasehat untuk skripsi penulis sehingga selesai dengan baik.
6. Segenap Dosen dan Staf Karyawan Fakultas Syariah dan Hukum yang telah dengan sabar mendidik penulis selama kurang lebih 4 tahun dan begitupun proses administrasi yang diarahkan dengan baik.
7. Perpustakaan Pusat dan Perpustakaan Kearsipan Dan Daerah, Perpustakaan pusat Universitas Hasanuddin Makassar. Dan juga Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum beserta jajarannya.
8. Supriadi, S. Sos., ME. sebagai sebagai staf fungsi AKPD ahli pertama dan juga ibu kasubag pendanaan dan pelaporan Marwa S. Si di Kantor Bappeda Enrekang dan jajarannya yang telah memberikan izin sekaligus mengarahkan untuk melakukan penelitian di Instansi Kepegawaian di Kabupaten Enrekang yaitu Bappeda dan Bapenda.
9. Kepada Abangku Angga Chaminra dan mbaku Diora Chaminra dan juga ade bungsuku Tipani Chaminra, kak Nana (Mutmainnah), Om Aji Yasin, Tante Aji Herlina, Ade Spupuku Muhammad Al-Amin, adeku Anissa Nur Yasin, kak Anasbi Nur Yasin, Kak Ayu Ainun Nur Yasin, kak Al-Farabi Nur Yasinyang sudah memberi semangat dan motivasi sampai skripsi ini rampung.
10. Teman-teman seangkatan khususnya ketika Irfan Sabri Hamza, Apriana, Nur Fatma Anggraeni, Faisal Jamal, dan teristimewa yaitu Muhammad Syamsul Abdullah yang tak henti-hentinya memberikan support untuk tetap rajin mengerjakan skripsi saya dan juga semua yang telah memberi semangat untuk menyelesaikan dan arahan yang membangun.
11. Teman-teman KKN angkatan 62 khususnya untuk bagian Desa Bonto Bangun Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba yang tetap terjaga memberi dorongan dan tidak ada bosan yang melanda.
12. Para Senior-senior saya Di Simposium dan juga teman seangkatan saya di Dewan Mahasiswa (DEMA) Fakultas Syariah Dan Hukum, dan juga teman saya di HMI Komisariat Syariah Dan Hukum, Kohati Komisariat Syariah dan Hukum, yang dari awal perkuliahan dan penyelesaian skripsi tetap terjaga mengguyur semangat untuk penulis.
13. Semua pihak yang tak dapat disebut satu persatu yang telah membantu sampai terselesaikannya skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dengan skripsi ini, maka dari itu penulis berharap masukan dan kritikan untuk menyempurnakan skripsi ini. Dan harapan penulis bahwa skripsi ini nantinya bisa bermanfaat bagi khalayak banyak. Dan atas segala kekurangan penulis memohon maaf.

*Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatu...*

## DAFTAR ISI

|   |     |
|---|-----|
| PENGESAHAN SKRIPSI.....   | i   |
| KATA PENGANTAR .....  | ii  |
| DAFTAR ISI.....   | iii |
| ABSTRAK.....  | vi  |
| BAB 1 PENDAHULUAN .....   | 1   |
| A. Latar Belakang Masalah .....                                     | 1   |
| B. Rumusan Masalah .....  | 6   |
| C. Fokus Penelitian Dan Deskripsi Fokus .....                       | 6   |
| D. Kajian Pustaka .....   | 7   |
| E. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian .....                             | 9   |
| BAB II TINJAUAN TEORITIS .....                                      | 11  |
| A. Implementasi Hukum.....  | 11  |
| 1. Pengertian Implementasi Hukum.....                               | 11  |
| 2. Hirarki Perda (Peraturan Daerah) Dan Asas-Asas Pemerintahan..... | 13  |
| B. Undang-Undang No.7 Tahun 2014 Tentang RPJMD.....                 | 20  |
| BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....                                 | 25  |
| A. Jenis Penelitian.....  | 25  |
| B. Lokasi Penelitian.....   | 26  |
| C. Pendekatan Penelitian .....                                      | 26  |
| D. Sumber Data.....   | 27  |
| E. Instrumen Penelitian .....                                       | 28  |
| F. Metode Pengumpulan Data.....                                     | 28  |
| G. Teknik Pengolahan Dan Analisis Data .....                        | 32  |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....                         | 36  |
| A. Sejarah, Gambaran Umum, Dan Lokasi Penelitian .....              | 36  |
| 1. Sejarah Bappeda Enrekang .....                                   | 36  |
| 2. Gambaran Umum Kondisi Daerah, Aspek Geografi Dan Demografi ..... | 38  |
| 3. Langkah Pemerintah Daerah Dalam Melaksanakan RPJMD .....         | 42  |
| 4. Gambaran Keuangan.....   | 43  |
| 5. Pengertian Apbd.....   | 47  |
| BAB V PENUTUP .....   | 50  |

|                      |    |
|----------------------|----|
| A. Kesimpulan .....  | 50 |
| B. Saran .....       | 50 |
| DAFTAR PUSTAKA ..... | 51 |
| LAMPIRAN.....        | 52 |



## ABSTRAK

**Nama : Ingrid Chaminra**

**Nim : 10400116074**

**Judul : TINJAUAN YURIDIS PERATURAN DAERAH (PERDA) NO. 7 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DI KABUPATEN ENREKANG**

---

Skripsi ini membahas mengenai bagaimana pengimplementasian Perda No. 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah di Kabupaten Enrekang Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana pelaksanaan Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah di kabupaten enrekang dan juga bagaimana peran Kepala Daerah Kabupaten Enrekang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah di Kabupaten Enrekang.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Peraturan Daerah (Perda) apakah di terapkan sebagaimana mestinya dan untuk mengetahui apakah pendanaan dalam pembangunan di kabupaten enrekang sangat transparansi atau malah ada kegagalan di dalam penerapannya.

Jenis penelitian yang digunakan adalah menggunakan pendekatan deskriptif dengan metode kualitatif, dimana menggunakan pendekatan deskriptif dapat menggambarkan atau menguraikan sesuatu hal menurut apa adanya, kemudian dengan menggunakan metode kualitatif maka penelitian yang dimaksudkan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami subjek penelitian secara kualistik dengan cara mendiskripsikan dalam format. Kata-kata dalam bahasa, pada suatu pertunjukan khusus dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pembangunan dan pendanaan, kebutuhan masyarakat setiap per-tahunnya sangat meningkat sehingga pendapatan daerah pun meningkat, jadi akuntabilitas dan juga transparansi terhadap pendapatan daerah juga baik dilakukan oleh pegawai dan juga pemerintah daerah di Kabupaten Enrekang. Perda yang berkesinambungan ini merupakan visi dan misi yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam mewujudkan ENREKANG EMAS, yang merupakan jargon dari pemerintahan di Kabupaten Enrekang.

*Kata Kunci :jargon (kosakata khusus yang dipergunakan di bidang kehidupan (lingkungan) tertentu.*



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara yang menganut sistem Presidensial parlementer yang dimana presiden memegang kekuasaan tertinggi dalam menjalankan sistem pemerintahan dan ketatanegaraan berdaulat, sebelum saya mengulas lebih dalam apa itu sistem presidensial parlementer terlebih dahulu saya menceritakan sejarah singkat terbentuknya Indonesia yang menjadi sebuah Negara kesatuan republik Indonesia ini<sup>1</sup>.

Sejarah mengatakan Indonesia merdeka dimulai sejak pembacaan naskah proklamasi oleh IR. SOEKARNO dan wakil presiden pada zaman itu DRS. MOH HATTA, tetapi perang antara Indonesia dan belanda belum usai pada saat itu karena pada tahun 1945-1949 dimulai dengan masuknya sekutu dibonceng oleh Belanda dalam hal ini Nederlandsch Indie Civiele Administratie (NICA) sebagian wilayah Indonesia setelah kekalahan jepang, dan diakhiri dengan penyerahan kedaulatan kepada Indonesia pada tanggal 27 Desember 1949. Pada masa itu juga, banyak sekali peristiwa sejarah yang telah terjadi diantaranya pergantian posisi kabinet, aksi polisionil oleh Belanda, sebagai perundingan, dan peristiwa-peristiwa sejarah lainnya<sup>2</sup>. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945 dan wafatnya bapak proklamator, semua tatanan dan pemerintahan dirombak dan Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial dan parlementer. Berdasarkan pembukaan UUD 1945 Alinea IV yang berbunyi, “bahwa kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu disusun dalam satu undang-undang Dasar Negara Indonesiayang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat, “dan pasal 1 Ayat 1 UUD 1945, yang berbunyi, “Negara Indonesia adalah Negara kesatuan yang berbentuk republik,” dapat diketahui bahwa bentuk Negara

---

<sup>1</sup>Ni'matul Huda, *Ilmu Negara*, (Jakarta:PT RajaGrafindo Persada,2010),hal.257

<sup>2</sup><http://id.m.wikipedia.org>, *Sejarah Indonesia(1945-1949)*, (diakses pada hari Jumat tanggal 12 Oktober 2019)

Indonesia adalah kesatuan republik Indonesia, berbentuk pemerintahan adalah republik. Sedangkan berdasarkan pasal 4 Ayat 1 yang berbunyi, “presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut undang-undang Dasar,” hingga menyatakan presiden republik Indonesia memegang kekuasaan sebagai kepala Negara sekaligus kepala pemerintahan, dapat diketahui bahwa sistem pemerintahan di Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial.

Tetapi menyimpang dari yang terdapat dalam UUD 1945 yaitu Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial, dalam praktik sistem pemerintahan banyak unsur-unsur sistem pemerintahan parlementer yang masuk ke sistem pemerintahan di Indonesia. Sehingga dapat dibilang sistem pemerintahan di Indonesia merupakan gabungan dari sistem pemerintahan presidensial dan parlemen, menurut pembahasan dalam acara *The Election Channel Roadshow*, sistem presidensial saat ini dianggap belum diterapkan secara utuh hingga lebih ke semi presidensial dan itu belum dianggap cukup baik dan efektif karena sebagian kewenangan yang dianggap strategis masih dipegang DPR, padahal sebaliknya diputuskan oleh Presiden. Dalam pembahasan juga disebutkan wewenang presiden harus dikembalikan karena dengan dengan begitu keadaannya tidak akan seperti sekarang yang memang menerapkan sistem presidensial, tetapi titik beratnya lebih ke legislatif.

Sebenarnya pemerintahan presidensial dan sistem pemerintahan parlementer terdapat perbedaan antara keduanya yaitu: sistem pemerintahan presidensial yang disebut juga sistem kongresional adalah suatu sistem pemerintahan dimana memiliki ciri-ciri antara lain, presiden menjadi kepala pemerintahan dan kepala Negara, presiden memiliki hak prerogatif (istimewa) hingga dapat mengangkat dan memberhentikan menteri-mentri yang hanya bertanggung jawab pada kekuasaan eksekutif, kekuasaan eksekutif tidak bertanggung jawab pada legislatif, kekuasaan eksekutif terpisah jelas dengan legislatif, kekuasaan eksekutif presiden dipilih langsung oleh rakyat atau melalui badan perwakilan rakyat.

Sedangkan sistem pemerintahan parlementer memiliki peranan penting dalam pemerintahan dan yang dimana memiliki ciri-ciri antara lain: parlemen adalah pemegang kekuasaan di pemerintahan, perdana menteri menjadi kepala pemerintahan dan presiden atau raja menjadi kepala Negara, perdana menteri memiliki hak prerogatif (hak istimewa) hingga dapat mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri yang hanya bertanggung jawab pada kekuasaan legislatif, kekuasaan legislatif bertanggung jawab kepada kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif presiden ditunjuk oleh legislatif, kekuasaan eksekutif dapat dijatuhkan oleh legislatif, adapula tatanan yang dimaksud lembaga eksekutif dan legislatif adalah suatu lembaga yang menduduki kursi parlementer, kedua lembaga tersebut sangat berperan aktif dalam sistem supremasi parlemen yang dikenal di dunia, bahkan Indonesia pun ikut menganut paham tersebut sebagaimana telah dijelaskan diatas, oleh karena itu, paham kedaulatan rakyat yang dianut dalam sistem parlementer melalui perlembagaan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang dikonstruksikan sebagai lembaga penjelmaan seluruh rakyat Indonesia yang berdaulat yang disalurkan melalui prosedur perwakilan politik (*political representation*).<sup>3</sup> Maka hasil dari sebuah sistem pemerintahan presidenial parlementer, kemudian lahirlah sebuah sistem dalam kewenangan yaitu berupa asas, desentralisasi, Sistem pemerintahan berdasarkan desentralisasi ini menurut beberapa pakar berbeda redaksionalnya, tetapi pada dasarnya mempunyai arti yang sama.

Menurut joeniarto, desentralisasi adalah memberikan wewenang dari pemerintahan Negara kepada pemerintah lokal untuk mengatur dan mengurus urusan tertentu sebagai rumah rumah tangganya sendiri. Sedangkan menurut Amarah Muslimin, mengartikan desentralisasi adalah pelimpahan wewenang pada badan-badan dan golongan-golongan dalam masyarakat dalam daerah tertentu untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Menurut UU

---

<sup>3</sup><http://kompasiana.com>, *Sistem pemerintahan presidensial dan parlementer*, (diakses pada hari Jumat tanggal 12 Oktober 2019)

No. 5 Tahun 1974 Pasal I butir b, desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan dari pemerintahan atau daerah tingkat atasnya kepada daerah menjadi urusan rumah tangganya.<sup>4</sup>

Dilihat dari pelaksanaannya fungsi pemerintahan, desentralisasi atau otonomi itu menunjukkan satuan-satuan desentralisasi (otonomi) lebih fleksibel dalam memenuhi berbagai perubahan yang terjadi dengan cepat, satuan-satuan desentralisasi dapat melaksanakan tugas dengan efektif dan lebih inovatif. Meskipun penilaian terhadap desentralisasi memperlihatkan catatan-catatan keberhasilan, namun pemerintah masih berhati-hati dalam bergerak ke arah desentralisasi yang lebih luas karena atau ke arah pendelegasian pelaksanaan pembangunan. Data-data memang tidak memungkinkan penilaian yang pasif terhadap dampak desentralisasi, namun kondisi-kondisi yang memengaruhi pelaksanaan program-program desentralisasi, dapat diketahui dengan pasti. Kondisi-kondisi tersebut adalah para pejabat pusat dan birokrasi pusat yang mendukung desentralisasi dan organisasi-organisasi yang disertai tanggung jawab.<sup>5</sup>

Selain itu juga agar lebih kepada masyarakat maka tingkat kabupaten dijadikan sebagai ujung tombak otonomi daerah menjadi tepat, namun tidak menutup kemungkinan kecurigaan pemerintah daerah yang mengatakan selama ini beratnya pemerintah pusat memberikan otonomi daerah yang luas kepada pemerintah daerah karena pertimbangan ekonomi yang memberikan keuntungan pada pendapatan nasional dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil bumi yang ada di daerah<sup>6</sup>.

Dalam islam, mengenai tentang pemerintahan untuk mengatur dan mengelola bumi telah Allah sebutkan sendiri. Allah berfirman dalam Al-Qur`an Surah An-Nur ayat 55 :

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ

---

<sup>4</sup> Ni'Matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,2005),hal 329

<sup>5</sup> Ni'Matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,2005),hal 330

<sup>6</sup> H. Inu Kencana Syafii, *Ilmu Pemerintahan*

Terjemahannya : “Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang saleh bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa dimuka bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa”.

Disebutkan bahwa ayat ini turun kepada Rasulullah dikarenakan keluh kesah sebagian sahabat beliau pada beberapa kejadian memilukan yang menimpa mereka dari pihak musuh, berupa rasa takut yang mengecam dan menteror, berupa gangguan dan hal-hal menyusahkan yang mereka jumpai karena kejadian-kejadian memilukan tersebut. [Tafsir ath-Thabari: 19/209[1]].

Pada ulam tafsir menjelaskan bahwa dalam ayat yang mulia ini, sebenarnya terdapat sumpah Allah yang tersirat dari ungkapan “*layastakhlifannahum*” yang diistilakan oleh pakar bahasa Al-Qur’an sebagai *jawabul-qasm* (jawaban sumpah). Lalu apa sumpah Allah tersebut? Dia bersempah akan menjadikan orang-orang yang beriman dan beramal shalih sebagai Khalifa (penguasa) dimuka bumi yang akan mengatur dunia dengan syari’at-Nya.

Dan juga Allah SWT, menjanjikan kemenangan bagi orang-orang yang beriman dari kalian dan mengerjakan amal-amal shalih, dengan mewariskan kepada mereka tanah kekuasaan kaum musyrikin dan menjadikan mereka penguasa padanya, sebagaimana Allah melakukan para pendahulu mereka dari kalangan kaum Mukminin yang beriman kepada Allah dan Rasul-RasulNya, dan menjadikan Agama mereka yang diridahiNya bagi mereka (yaitu Islam) sebagai Agama Mulia lagi kuat dan menggantikan keadaan mereka dari ketakutan menuju keadaan aman, bila mereka beribadah kepada Allah semata dan istiqamah diatas ketaatan kepadaNya, tidak mempersekutukan sesuatu pun bersamaNya. Dan barang siapa kafir setelah mengambil alih kekuasaan kaum Musyrikin, keadaan aman, penguasaan dan kekuasaan yang penuh dan mengingkari nikmat-nikmar Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang telah keluar dari ketaatan kepada Allah.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup><http://brainly.co.id/tugas/29101113>, isi kandungan surat An-Nur Ayat 55, (diakses pada Hari Rabu tanggal 17 Juni 2020)

## **B. Rumusan masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut maka diajukan sebuah permasalahan pokok yaitu bagaimanakah implementasi peraturan daerah No. 7 tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah di Kabupaten Enrekang.

1. Bagaimanakah pelaksanaan Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah di Kabupaten Enrekang?
2. Bagaimanakah peran Kepala daerah Kabupaten Enrekang dalam Rencana Pembangunan di Kabupaten Enrekang?

## **C. Fokus penelitian dan Deskripsi Fokus.**

### **1. Fokus penelitian**

Dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian adalah bagaimana penerapan dari pelaksanaan peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Di Kabupaten Enrekang serta bagaimana peraturan ini diketahui oleh masyarakat dan menjadi sebuah solusi bagi masyarakat apabila memiliki rencana untuk kedepannya memiliki strategi memajukan Desa itu sendiri.

### **2. Deskripsi Fokus**

Memberikan arahan agar terhindar dari kesalahpahaman untuk mendefinisikan masalah dan juga memahami pokok-pokok permasalahan dalam penelitian ini maka penulis membagi bagian yang dianggap penting.

#### **a. Implementasi Hukum**

Implementasi merupakan penerapan atas tindakan yang harus dilakukan oleh sekelompok individu yang telah ditunjukkan untuk menyelesaikan suatu

tujuan yang telah ditentukan sebelumnya sebagaimana peraturan daerah yang diterapkan.<sup>8</sup>

b. Hierarki Peraturan Daerah dan Asas-Asas pemerintahan

Peraturan Daerah merupakan suatu hierarki perundang-undangan yang ada di Indonesia sebagaimana dijelaskan di latar belakang setiap daerah diatur oleh aturan yang mengikat untuk memajukan ke maslahatan masyarakatnya. Begitupun yang diatur dalam Perda No. 7 Tahun 2014 tentang RPJM Daerah dari Tahun 2014-2018.<sup>9</sup>

c. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Rencana pembangunan jangka menengah Daerah adalah penjabaran dari visi, misi, dan program kepala yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)

**D. KAJIAN PUSTAKA**

Masalah yang akan dikaji dalam penelitian skripsi ini terkait dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 maka dalam penyusunan skripsi ini dilengkapi dengan beberapa referensi yang dijadikan sebagai acuan, diantaranya:

1. Dr. Ni'Matul Huda, S.H., M.HUM. Hukum Tata Negara Indonesia, dalam buku ini merupakan pelengkap dari sejumlah literatur yang ada, yang membahas masalah ketatanegaraan Indonesia pasca perubahan UUD 1945, disamping itu telah lahir pula lembaga baru yang bernama Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial. Berdasarkan perintah Undang-Undang, dan bahkan terdapat lembaga

---

<sup>8</sup><https://www.sumberpengertian.id>, pengertian implemtasi menurut para ahli, (diakses pada hari minggu 03 November 2019)

<sup>9</sup><http://peraturan.bpk.go.id>, perda kabupaten enrekang nomor 7 tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah, (diakses pada hari minggu, 03 November 2019)



yang kewenangannya berasal dari keputusan presiden belaka. Berkaitan dengan adanya perubahan-perubahan tersebut, kehadiran buku ini dirasakan sangat diperlukan sebagai pelengkap dari sejumlah literatur yang ada, yang membahas masalah Hukum Tata Negara Indonesia pasca reformasi dan perubahan UUD 1945

2. Dr. Ni'Matul Huda, S.H., M.HUM. Ilmu Negara, dalam buku ini merupakan sejumlah literatur yang membahas tentang ilmu Negara dan teori Negara. Buku ini menguraikan tentang pengertian ilmu Negara, unsur-unsur Negara, kedaulatan, demokrasi, kekuasaan, konstitusi, bentuk Negara, dan sistem pemerintahan. Baik yang disampaikan oleh ahli baik pemikir-pemikir muslim dan non-muslim, agar dapat diketahui kontribusi masing-masing ahli dalam khazanah keilmuan kenegaraan secara proporsional.
3. Prof. Dr. Donald Albert Rumokoy, S.H., M.H. dan Frans Maramis, S.H., M.H. Pengantar Ilmu Hukum, dalam buku ini terdapat dua pertanyaan pokok akan dibahas, yaitu apakah hukum, dan apakah ruang lingkup hukum itu dan juga membahas beberapa hal lain untuk dapat lebih memberikan pemahaman terhadap dua pertanyaan diatas seperti istilah dan luasnya pengertian hukum.
4. H. Zaeni Asyhadie, S.H., M.Hum. dan Arief Rahman, S.H., M.Hum, dan Hj. Mualifah, S.H., M.H. Pengantar Hukum Indonesia, buku ini membahas mata kuliah inti atau mata kuliah dasar bagi mahasiswa baru (semester II) difakultas hukum seluruh Indonesia. Memberikan gambaran bagaimana, mengapa, dan dimana Hukum, maka dalam Pengantar Hukum Indonesia memberikan gambaran tentang Hukum-Hukum Yang pernah dan sedang berlaku di Indonesia. Selain itu menguraikan tentang asas-asas, dan apa yang menjadi berlakunya hukum yang bersangkutan.



5. Prof. Dr. H. Inu Kencana Syafie, M.Si. buku ini membahas penguraian dengan terperinci komperhensif, namun integral mengenai ilmu pemerintahan mulai dari objeknya, ekologi, pardigmanya, ruang lingkupnya, asasnya, sampai dengan teknik-tekniknya. Lebih jauhnya buku ini juga menjelaskan hubungan ilmu pemerintahan dengan agama, mulai dari islam, Kristen, budha, tao, sikh, bahkan yahudi.
6. R. Joeniarto, S.H., dalam buku ini sipenulis menjelaskan bahwa buku ini juga menjelaskan bagaimana hubungan antara pemerintah lokal dengan asas-asas pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan negara, dan juga peraturan-peraturan tentang pemerintahan lokal sejak proklamasi sampai sekarang.

#### ***E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian***

##### **1. Tujuan penelitian**

Berdasarkan pokok permasalahan diatas, maka tujuan yang akan dicapai yaitu sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui penerapan peraturan daerah Nomor 7 tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah di Kabupaten Enrekang
- b. Untuk mengetahui Bagaimana peran Kepala daerah Kabupaten Enrekang dalam Rencana Pembangunan di Kabupaten Enrekang.

##### **2. Kegunaan penelitian.**

###### ***a. Kegunaan Teoritis***

- 1) Dari hasil penelitian ini akan memberikan ilmu pengetahuan dalam Rencana Pembangunan di Kabupaten Enrekang.

- 2) Dapat dijadikan salah satu sumber referensi dan pembelajaran bagi mahasiswa/I terkhususnya mahasiswa jurusan ilmu hukum untuk mengkaji otonomi daerah di Kabupaten Enrekang.

**b. Kegunaan praktisi**

Harapan yang ingin dicapai oleh penulis dalam hal ini adalah peneliti menjadi sumber informasi bagi praktisi hukum, dan juga bagi masyarakat lainnya yang minim pengetahuan tentang hukum khususnya peraturan Daerah yang ada di kabupaten masing-masing.



## BAB II

### TINJAUAN TEORETIS

#### A. *Implementasi Hukum*

Indonesia merupakan Negara hukum yang dimana didalamnya terjadi interaksi dan menjalin hubungan sesama warga Negara maupun pemerintahan. Tidak dapat dipungkiri bahwa keberadaan pemerintah telah membawa dampak positif bagi Negara ini karena mengatur berjalannya roda pemerintahan itu sendiri. Didalam kehidupan sehari-hari terdapat sesuatu yang sangat penting untuk mendapat mengatur kehidupan masyarakat, sesuatu tersebut adalah Hukum, pada prinsipnya hukum merupakan kenyataan dan pernyataan yang beraneka ragam untuk menjamin adanya penyesuaian kebebasan dan kehendak seseorang dengan orang lain, berdasarkan asumsi ini pada dasarnya hukum mengatur hubungan antara manusia di dalam masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip yang beraneka ragam pula.

Oleh sebab itu setiap orang di dalam masyarakat wajib taat dan mematuhi hukum yang berlaku. Akal dan intelektualitas seorang birokrat pemerintah, hendaknya dipergunakan dengan mengoprasionalakan otaknya untuk berfikir, berusaha mencari kebenaran sesuai dengan kemampuan ilmu penegetahuan masing-masing sama halnya dengan masyarakat pada umumnya menggunakan akal dan fikirannya untuk berfikir apabila ilmu itu bebas nilai maka itu disebut dengan sekuler, sehingga terjadi ketiraniaan karena nilai adalah gagasan berharga.<sup>10</sup>

#### 1. **Pengertian implementasi Hukum**

Adapun yang dimaksud dengan implemntasi hukum adalah sebuah tindakan atau proses gagasan yang sudah disusun dengan begitu cermat dan detail. Implementasi ini umumnya; tuntas sesudah dianggap permanen, implementasi ini tidak Cuma aktivitas, namun sebuah kegiatan yang direncanakan serta dikerjakan dengan serius dengan berpedoman pada beberapa norma spesifik mencapai maksud kegiatan.

---

<sup>9</sup>Inu Kencana Syafie, *Ilmu Pemerintahan*, (Jakarta; PT Bumi Aksara, 2013), hal.13

Sebelum mengenal lebih jauh kata makna Implementasi hukum tersebut adapun pengertian implementasi itu sendiri adalah dari bahasa Inggris yakni *to implement* yang memiliki arti mengimplementasikan, implementasi adalah penyediaan fasilitas untuk melakukan suatu akibat pada suatu hal. Suatu hal itu bisa berbentuk ketentuan undang-undang, ketentuan pemerintah, ketentuan peradilan serta kebijakan yang dibuat oleh instansi pemerintahan dalam kehidupan kenegaraan. Sejarah menyebutkan, hukum yang mengatur bentuk-bentuk Negara (kesatuan atau federal), dan bentuk pemerintahan (kerajaan atau republik) yang menunjukkan masyarakat hukum yang atasannya maupun bawahannya, beserta tingkatan-tingkatannya (*hierarchie*) yang selanjutnya menegaskan wilayah dan lingkungan rakyat dari masyarakat-masyarakat hukum itu dan akhirnya menunjukkan alat-alat perlengkapan (yang memegang kekuasaan penguasa) dari masyarakat hukum itu, beserta susunan (terdiri dari seseorang atau sejumlah orang), wewenang, tingkatan imbalan dari dan antara alat perlengkapan itu.<sup>11</sup>

Sumber hukum utama dalam tatanan hukum di Indonesia adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan, bahwa tujuan nasional Negara Republik Indonesia adalah “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi serta keadilan sosial”.<sup>12</sup>

Didalam ilmu hukum kita mempelajari juga tentang pokok dan sendi-sendi Negara dapat memberikan dasar-dasar teoritis yang bersifat umum untuk Tata Negara. Oleh karena itu, agar dapat mengerti dengan sebaik-baiknya dan sedalam-dalamnya sistem hukum ketatanegaraan sesuatu Negara tertentu, sudah sewajarnya kita terlebih dahulu memiliki

---

<sup>11</sup>Zaeni Aayhadie, dan Arief Rahman, dan Mualifah, *pengantar Hukum Indonesia* (PT.RajaGrafindo Persada)hal.191

<sup>12</sup>Zaeni Aayhadie, dan Arief Rahman, Dan Mualifah, *pengantar Hukum Indonesia* (PT.RajaGrafindo Persada)hal.196

pengetahuan tersebut. Karena ilmu Negara dapat memberikan dasar-dasar teoritis untuk Hukum Tata Negara yang positif. Hukum tata Negara merupakan penerapan di dalam kenyataan-kenyataan konkret dari bahan-bahan teoritis yang dihasilkan oleh ilmu Negara.<sup>13</sup>

Maka dari itu pengimplementasian sistem hukum akan berjalan apabila didukung tiga unsur sebagaimana disebutkan dibawah ini berjalan seirama seperti lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif. Dimana struktur, substansi, dan kultur berinteraksi. Apabila dipahami secara sederhana bahwa struktur ini menyangkut tubuh institusional yang terdiri dari hakim dan orang-orang yang terkait dipengadilan, maka substantinya adalah perangkat hukum yang lahir dari sebagai aturan yang harus institute jalankan.<sup>14</sup>

## **2. Hierarki Perda (Peraturan Daerah) dan asas-asas pemerintahan.**

Undang-undang Dasar Negara RI Tahun 1945 Merupakan Hukum tertinggi dan instrument utama bagi pemerintahan Indoneisa. Selama 60 tahun UUD 1945 ini telah menuntut proses perubahan berbagai lembaga Pemerintahan dan menjadi dasar bagi stabilitas politik, kebebasan hak asasi manusia dan juga pertumbuhan ekonomi dan kemajuan social. Untuk mencapai maksud itu, para pejabat daerah membantu mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Kesejahteran Sosial melalui pembangunan Daerah yang bersifat otonom atau bersifat daerah administrasi. Asas otonomi dan tugas pembantu secara yuridis formal tercantum dalam pasal 18 UUD.<sup>15</sup> Hierarki pembentukan undang-undang tentang otonomi daerah itu sendiri. Apabila ditelaah dari sejarah pembentukan UUD 1945, dapat dikatakan bahwa Muh. Yamin-lah orang pertama yang membahas masalah pemerintahan daerah dalam Sidang BPUPKI 29 Mei 1945, Muhammad Yamin antara lain mengatakan sebagai berikut; “Negeri, Desa, dan segala persekutua Hukum Adat yang diperbaharui

---

<sup>13</sup> Ni'matul Huda, *imu Negara* (PT. RajaGrafindo Persada) hal. 7-8

<sup>14</sup> <http://pa-pekalongan.go.id/> IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA WARGA NEGARA (diakses pada hari Jumat, 13 Desember 2019).

<sup>15</sup> Pipin Syarifin, dan Dedeh Jubaedah, *PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA* (CV.PUSTAKA SETIA) hal.13

dengan jalan Rasionalisme dan pebaharuan zaman, dijadikan kaki susunan sebagai bagian bawah. Antara bagian atas dan bagian bawah dibentuk bagian tengah sebagai Pemerintahan Daerah untuk menjalankan pemerintahan urusan dalam, Pangreh Praja”. Berdasarkan pendapat tokoh perancang UUD 1945 tersebut, dapat disimpulkan bahwa esensi yang terkandung dalam ketentuan pasal 18 UUD 1945.<sup>16</sup>

Adapun isi pasal tersebut adalah “ Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, tiap-tiap provinsi, Kabupaten, dan Kota itu mempunyai Pemerintahan daerah, yang diatur dengan Undang-undang. Untuk dapat membangun dan membina alat-alat perlengkapan pemerintah, termasuk yang ada didaerah, agar mampu melaksanakan tugas-tugasnya sehari-hari, termasuk tugas mengerakkan dan memperlancar pembangunan, sesuai dengan pembangunan dan pembinaan bidang hukum, sebagaimana dimaksud dalam garis besar haluan negara yang dituangkan dalam ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat No. IV/MPR/1973, maka perlu dibangun dan dibina adanya sistem pemerintahan didaerah berdasarkan kepada suatu sistem hukum yang tangguh dan mudah dipahami oleh setiap anggota pelaksanaan dan anggota anggota masyarakat, yang akan memikul hak dan kewajiban menurut kedudukan, fungsi, tugas, kekuasaan, dan wewenangnya masing-masing<sup>17</sup>

Pemerintahan lokal yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri mempunyai ciri-ciri yang berbeda dengan pemerintahan lokal administrasi. Meskipun didaerah telah memiliki pemerintahan lokal Administratif, baik yang umum maupun khusus, tetapi urusan-urusan tertentu untuk menyelenggarakan perlu lebih disesuaikan dengan keadaan daerah masing-masing. Terhadap urusan-urusan tersebut yang penyelenggaranya tidak didasarkan oleh garis-garis kebiksanaan pusat, dapat dijadikan sebagai urusan rumah

---

<sup>16</sup>Ni'Matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia* (PT. RajaGrafindo Persada)hal.301

<sup>17</sup>R. Joenirto, *Perkembangan pemerintah lokal* (PT. penerbit alumni)hal.15

tangga daerah. Di daerah dimana yang bersangkutan dibentuk pemerintah lokal, dimana terhadap urusan-urusan tersebut dapat mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.<sup>18</sup>

Dengan bertitik tolak dari pengertian Administrasi Negara seperti diuraikan pada butir-butir terdahulu, gejala-gejalanya dapat ditemui diberbagai suatu pemerintahan, diberbagai tingkatan pemerintahan dan dibadan-badan negara lainnya. Maka dinegara kita dikenal beberapa tingkatan pemerintahan, baik di telusuri melalui asas dekonstralisasi maupun asas desentralisasi. Melalui asas dekonstralisasi ditemui tingkatan-tingkatan pemerintahan sebagai berikut:

1. Tingkatan pemerintah provinsi dan ibukota Negara.
2. Tingkat pemerintah Kabupaten dan Kota Madya.
3. Tingkat pemerintah Kota Administratif (dibeberapa Wilayah Kabupaten)
4. Tingkat Pemerintahan Kecamatan.

Melalui asas Desentralisasi ditemui tingkatan-tingkatan pemerintahan Daerah sebagai berikut:

1. Daerah Tingkat I, yang Daerah atau wilayahnya jatuh bertepatan dengan Provinsi dan Ibukota Negara.
2. Daerah Tingkat II, yang Daerah atau Wilayahnya jatuh bertepatan dengan Kabupaten dan Kota Madya.

Disamping itu masih ditemukan satu tingkat pemerintahan yang terendah langsung dibawah Kecamatan yaitu Pemerintahan Kelurahan/Desa. Berhubung dengan apa yang diuraikan diatas, timbullah masalah hubungan Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Wilayah/Daerah yang ditinjau dari segi Administrasi Negara merupakan hubungan antara kantor-kantor Pusat (*Head Quartes*) dengan kantor-kantor Cabang Daerah (*Faild Offices*). Misalnya hubungan antara Kantor Pusat Departemen dengan Kantor Wilayah Departemen di

---

<sup>18</sup> R. Joenirto, *Perkembangan pemerintah lokal* (PT. penerbit alumni) hal.27

Provinsi Daerah Tingkat I, atau Kantor Ditjen dan sebagainya. Administrasi Daerah yang dimaksud adalah Administrasi Daerah (Otonom) Tingkat I dan Administrasi Daerah (Otonom) Tingkat II, yang suatu Administrasi memiliki khususan sesuai dengan faktor-faktor Ekologis yang melingkunginya. Sejalan dengan pengetahuan Administrasi Negara bersifat Kolektif (*Colletive Tern*) maka Adminstrasi Daerah yang juga termaksud ke dalam Administrasi Negara, meliputi:

1. *Pemerintahan Daerah*, yang berdasarkan Pasal 13 UU No. 5 Tahun 1974, terdiri dari Kepala Daerah dan DPRD;
2. *Aparatur Pemerintahan Daerah*, yang pada pokoknya mencakup semua Pejabat dan pegawai Pemerintah Daerah;
3. *Struktur Organisasi Administratif Daerah*;
4. *System dan prosedur Administrasi Daerah*;
5. *Peraturan Perundang-undangan Daerah*.

Walaupun Administrasi Daerah terdiri dari unsur-unsur seperti diatas, maka ditekankan disini bahwa yang menjadi titik pusat (*Central Organ*) adalah Kepala Daerah, baik dalam sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia maupun diluar Negeri.<sup>19</sup>

Dalam mempelajari Administrasi Negara adapun yang paling berpengaruh dalam tingkat perekonomian suatu Daerah adalah APBN yang berorientasi kepada program kerja, sehingga tanpa memperhatikan pendapat Negara secara real direncanakan pengeluaran yang pada umumnya melampaui batas pendapatan Negara, guna melaksanakan program Pemerintahan. Dengan lain perkataan ditempuh kebijakan anggaran (*defict spending policy*) yang biasanya ditutupi dengan meminta uang muka (*voorschot*) kepada Bank sentral, dimana selanjutnya bank sentral mencetak uang baru.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> S. Padmuji, *Ekologi Administrasi Negara* (PT. BINA AKSARA) hal. 35-37

<sup>20</sup> S. Padmuji, *Ekologi Administrasi Negara* (PT. BINA AKSARA) hal. 125



Masalah lain timbul dimana yang menyusahkan hubungan antara pusat-lapangan, terutama pada pada program-program multi-fungsi, adalah apakah wewenang pejabat pusat dalam menjalin hubungan dengan daerah terkonsentrasi atau dibagi. Suatu praktek yang cukup meluas telah dikembangkan, biasanya berdasarkan “*Trial and Error*” dan bergantung pada wujud program itu saja. Tetapi dalam banyak hal tidak ada praktek yang memuaskan. Dimana pejabat eksekutif tertinggi tidak mau mendelegasikan wewenangnya dan mencoba melakukan segala sesuatu sendiri, disitu harus menyiapkan sendiri instruksi kepada kantor daerah atau memperkerjakan orang untuk membawa surat-surat yang perlu untuk ditandatangani maka semuanya impas<sup>21</sup>.

Seperti yang dikemukakan sebelumnya diatas, sistem pemerintahan dan ketatanegaraan dengan Negara yang jarang sekali sepenuhnya sama, walaupun dasarnya sama yaitu penyelenggaraan sistem demokrasi dengan jalan perwakilan. Perbedaan sistem Pemerintahan dapat dilihat dari sisi penunjukan wakil-wakil rakyat, cara penyusunan badan perwakilan, hubungan antara badan perwakilan dengan aparatur penyelenggara pemerintahan, atau tugas dan wewenang lembaga-lembaga pemerintahan.<sup>22</sup>

Mengenai asas-asas yang terkandung dalam sistem otonomi daerah tersebut dikenal dengan asas desentralisasi istilah desentralisasi berasal dari bahasa latin “*de*” berarti lepas dan “*centrum*” artinya pusat. Desentralisasi merupakan lawan kata dari sentralisasi sebab kata “*de*” maksudnya adalah menolak kata sebelumnya. Berdasarkan asal perkataannya, desentralisasi ialah melepaskan dari pusat. Menurut Joeniarto, asas desentralisasi adalah asas yang bermaksud memberikan wewenang dari pemerintahan negara kepada kepada pemerintahan lokal untuk mengatur dan mengurus urusan tertentu sebagai urusan rumah tangga sendiri, yang biasanya disebut swatantra atau otonomi. Amarah Muslimin

---

<sup>21</sup>Dimock.Dimock.Fox *Administrasi Negara* edisi kelima jilid 2 (PT. Gelora Aksara Pratama) penerbit ERLANGGA.hal.41

<sup>22</sup> Wahyudi Kumorotomo, *Etika Administrasi Negara* (PT. RajaGrafindo Persada)hal.268

berpendapat bahwa desentralisasi berarti pelimpahan kewenangan-kewenangan oleh Pemerintah Pusat pada badan-badan otonom (swantantra) yang berada di daerah-daerah. Dalam suatu negara kesatuan dengan asas desentralisasi, terdapat daerah-daerah yang pemerintah daerahnya diberi wewenang mengatur rumah tangga daerahnya itu, yang bisa disebut “swantara” atau “otonom”. Dari desentralisasi pemerintahan daerah bahwa penyelenggara pemerintah daerah adalah pemerintah daerah dan DPRD. Dengan demikian, pemerintah daerah Provinsi, Kabupaten dan kota dapat mengatur dan mengurus sendiri pemerintahannya menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 18 Ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2004. Maksud kata “mengatur” dan “mengurus” ini adalah fungsi mengurus ditunjukkan kepada Badan Eksekutif Daerah adalah kepala daerah dan perangkat daerah otonom sesuai dengan hak dan kewajiban menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>23</sup>

Setelah pemerintahan orde baru mengakhiri masa Pemerintahannya pada 20 Mei 1998 karena disapu oleh gerakan reformasi, UUD 1945 yang selama pemerintahan Orde Baru disakralkan dan tidak dapat diubah oleh MPR sekalipun, pada 19 Oktober 1999 untuk pertama kalinya UUD 1945 diamandemen. Melalui sidang umum MPR tahun 1999, ada Sembilan (9) Pasal yang diubah; Pasal 5 Ayat (1), Pasal 7, Pasal 9, Pasal 13 Ayat (2) Pasal 14, Pasal 15, Pasal 17 Ayat (2) dan (3), Pasal 20 dan Pasal 21<sup>24</sup>

Pada dasarnya desentralisasi bertujuan membangun partisipasi masyarakat dan mengundang keterlibatan publik seluas-luasnya dalam proses perencanaan, implementasi dan evaluasi pembangunan yang dijalankan. Untuk itu desentralisasi memberikan ruang yang lebih luas kepada daerah untuk secara demokratis mengatur pemerintahannya sendiri sebagai

---

<sup>23</sup>Pipin Ayarifin dan Dedah Jubaedah, *PEMERINTAHAN DAERAH DI INDONESIA*(CV. PUSTAKA SETIA BANDUNG)2006,hal97-99

<sup>24</sup>Ni'matul Huda, *Otonomi daerah filosofis, Sejarah Perkembangan dan problematika* (PUSTAKA PELAJAR)2005,hal.17

manifestasi dari cita-cita sistem desentralisasi. Tetapi, pelaksanaan sistem ini mendapatkan tantangan yang cukup besar. Kendala-kendala tersebut diantaranya:

1. *Midset* atau mentalitas aparat birokrasi yang belum berubah
2. Hubungan antara institusi pusat dengan daerah.
3. Sumber daya terbatas.
4. Pertarungan kepentingan yang berorientasi pada perebutan kekuasaan, penguasa asset dan adanya semacam gejala *powershift syndrome* yang menghinggapi aparat pemerintah;
5. Keinginan pemerintah untuk menjadikan desa sebagai unit politik disamping unit sosial budaya dimana desa memiliki tatanan sosial budaya yang otonom.<sup>25</sup>

Desentralisasi tidak hanya dikaitkan dengan gagalnya perencanaan secara terpusat dan kesadaran bahwa pembangunan merupakan suatu proses yang kompleks yang tidak dapat direncanakan dan dikendalikan dengan mudah dari pusat. Ada berbagai pengertian desentralisasi. Desentralisasi sistem ini berarti pengakuan terhadap keberagaman dan pluralitas masyarakat, langkah yang perlu ditempuh oleh pemerintah dalam merealisasikan sistem desentralisasi ini yaitu pengembangan wilayah. Pengembangan wilayah di Indonesia bukan merupakan usaha-usaha yang terbatas pada pemerataan pembangunan antara daerah dan wilayah dalam satu daerah. Namun lebih dari itu ia merupakan suatu usaha pula untuk menciptakan dan melembagakan suatu budaya pembangunan baru di kalangan instansi, aparat perencanaan, pelaksanaan pembangunan serta di kalangan masyarakat daerah. Dengan demikian, secara konseptual pembangunan wilayah merupakan perpaduan dari dua usaha pembangunan, yaitu perbaikan kehidupan perekonomian terutama rakyat miskin di suatu

---

<sup>25</sup> PHENI CHALID *OTONOMI DAERAH MASALAH, PEMBERDAYAAN, DAN KONFLIK* (Perpustakaan Nasional RI: Katalog Dalam Terbitan)2005,hal.6-7

wilayah dengan usaha-usaha pembangunan yang bertujuan untuk mengubah budaya pembangunan di kalangan instansi, aparat pemerintah daerah dan masyarakat.<sup>26</sup>

## **B. UNDANG-UNDANG NO.7 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)**

Sama halnya penerapan dari Peraturan Daerah Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yaitu melaksanakan pembangunan daerah selama 5(lima) tahun dan membuatkan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah ini akan dijabarkan kedalam bentuk dokumen Rencana pemerintahan Daerah (RKPD) Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA), Rencana Kerja (RENJA) serta prioritas dan plafon anggaran (PPA) setiap tahunnya. Maka suatu tata pemerintahan yang baik menurut dokumen kebijakan UNDP adalah penggunaan wewenang ekonomi, politik dan administrasi guna mengelola urusan-urusan negara pada semua tingkat. Tata pemerintahan mencakup seluruh mekanisme, proses, dan lembaga-lembaga dimana warga dan kelompok-kelompok masyarakat mengutarakan kepentingan mereka, menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban dan menjabatani perbedaan-perbedaan diantara mereka.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> PHENI CHALID *OTONOMI DAERAH MASALAH, PEMBERDAYAAN, DAN KONFLIK* (Perpustakaan Nasional RI: Katalog Dalam Terbitan)2005, hal.30-32

<sup>27</sup> PHENI CHALID *OTONOMI DAERAH MASALAH, PEMBERDAYAAN, DAN KONFLIK* (Perpustakaan Nasional RI: Katalog Dalam Terbitan)2005, hal.67

### 3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) di Kabupaten Enrekang.

Perencanaan jangka menengah (*medium-term planning*) biasanya mencakup waktu 4-5 tahun, tergantung dari masa jabatan presiden atau kepala daerah. Di Indonesia, perencanaan jangka menengah mempunyai jangka waktu 5 tahun yang disusun baik oleh pemerintahan nasional maupun pemerintahan daerah. Perencanaan jangka menengah pada dasarnya merupakan jabaran dari perencanaan jangka panjang sehingga bersifat lebih operasional. Perencanaan jangka panjang berisikan perumusan kerangka ekonomi makro, strategi, kebijakan dan program pembangunan yang disusun berdasarkan visi dan misi presiden atau kepala daerah yang terpilih. Disamping itu, perencanaan jangka menengah memuat juga sasaran dan target pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif supaya perencanaan tersebut menjadi terukur dan mudah dijadikan sebagai dasar dalam melakukan monitoring dan evaluasi.<sup>28</sup>

Setiap perangkat daerah yang mempunyai tugas memungut atau menerima pendapatan Daerah wajib melaksanakan intensifikasi pemungutan pendapatan tersebut. Semua manfaat yang bernilai uang berupa komisi, rabat, potongan, bunga atau nama lain sebagai akibat dari penjualan dan atau pengadaan barang dan jasa dari penyimpanan dan atau penempatan uang daerah merupakan pendapatan daerah<sup>29</sup>

Disamping tujuan pendapatan diatas setiap perencanaan pembangunan, baik jangka panjang dan jangka menengah, disusun dengan mengacu pada visi dan misi yang telah ditetapkan sebelumnya. Hal ini dilakukan agar perencanaan yang disusun benar-benar mengacu pada tujuan dan saran pada visi dan misi yang telah disepakati dan ditetapkan tersebut. Visi dan misi pembangunan daerah yang baik biasanya dijangkit secara intensif dari aspirasi dan keinginan dari masyarakat yang menjadi sasaran utama pembangunan tersebut. Visi pada

---

<sup>28</sup>SJAFRIZAL *Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi* (PT. Grafindo Persada, Jakarta)2014,hal.31

<sup>29</sup>Dadang Solihin, dan Putut Marhayudi, *Panduan lengkap otonomi Daerah* (penerbit ISMEE,Jakarta)2002,hal.236

dasarnya adalah kondisi objektif yang diinginkan dan dicita-citakan dapat diwujudkan dimasa depan oleh seluruh lapisan masyarakat pada priode tertentu. Visi yang baik adalah menyangkut kebutuhan pokok yang sangat mendasar bagi masyarakatnya dan dirumuskan secara konkret dan jelas serta dapat mewujudkan dalam kenyataannya (*oprasional*) untuk memahami perumusan visi tersebut, berikut ini diberikan contoh visi yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan pembangunan

1. Visi dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJM) Nasional 2005 - 2025: *“Terwujudnya Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil, dan Makmur”*.
2. Visi dalam RPJP Provinsi Sumatra Barat 2005-2025; *“menjadi Provinsi Terkemuka Berbasis Sumber Daya Manusia yang Agamais di Tahun 2015*
3. Visi dalam RPJM Nasional 2010-2015: *“Terwujudnya Indonesia yang Sejahterah, Demokratis, dan Berkeadilan”*.
4. Visi dalam RPJM Provinsi Sumatra Barat 2006-2010: *“Terwujudnya Masyarkat Sumatra Barat Madani Yang Adil, Sejahtera, dan Bermartbat.*

Sedangkan misi pada dasarnya merupakan cara dan upaya umum dan bersifat pokok yang akan dilakukan dalam mewujudkan dan merealisasikan visi yang telah ditetapkan tersebut. Karena misi berhubungan erat dengan arah, kebijakan program, dan kegiatan pembangunan yang akan dilakukan untuk mewujudkan visi pembangunan. Disamping itu misi pembangunan ini juga dirumuskan dengan memperhatikan permasalahan dan kendala yang dihadapi dimasa lalu serta sasaran pembangunan yang ingin dicapai dimasa mendatang. Sebagai contoh dapat diberikan bahwa misi yang tertera dalam RPJP Indonesia 2005-2025 meliputi delapan aspek utama yaitu:

1. Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan filsafa pancasila;
2. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing tinggi;

3. Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum;
4. Mewujudkan Indonesia yang aman, damai, dan bersatu;
5. Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan
6. Mewujudkan Indonesia yang asri dan lestari
7. Mewujudkan Indonesia menjadi Negara Kepulauan yang Mandiri, Maju, Kuat, dan berbasiskan kepentingan Nasional.
8. Mewujudkan Indonesia yang berperan dalam pergaulan dunia Internasional.<sup>30</sup>

Adapun yang menjadi landasan Kabupaten Enrekang sama halnya dengan Rancangan Pembangunan di Daerah lain pada umumnya yang merupakan salah satu bentuk untuk melanjutkan pembangunan dikabupatennya dan salah satu rangkaian kegiatan otonomi daerah. Berdasarkan lahirnya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Penyelenggara pemerintahan desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur perwakilan daerah.

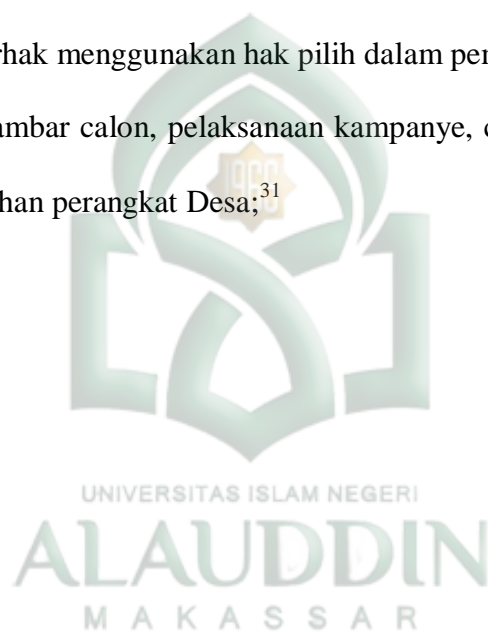
Peraturan desa merupakan penjabaran lebih lanjut tentang peraturan daerah mengenai peraturan desa yang menurut jenisnya antara lain terdiri dari

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
2. Penegasan Batas Wilayah Administrasi Desa
3. Penetapan Pusat-Pusat Pertumbuhan dan Pengembangan Desa
4. Penetapan Sebutan untuk Desa, Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Perwakilan Desa;
5. Penetapan keberadaan Lembaga Adat dan Lembaga Masyarakat di Desa.

---

<sup>30</sup>SJAFRIZAL *Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi* (PT. Grafindo Persada, Jakarta)2014,hal.54-55

6. Penetapan susunan organisasi pemerintahan Desa.
7. Pembentukan pemilihan pencalonan dan pemilihan anggota Badan Perwakilan Desa
8. Penetapan yang berhak menggunakan hak pilih dalam pemilihan anggota Badan Perwakilan Desa.
9. Penentuan tanda gambar calon, pelaksanaan kampanye dan cara pemilihan anggota Badan Perwakilan Desa.
10. Penetapan besarnya anggota Badan Perwakilan Daerah
11. Pembentukan panitia pencalonan dan pemilihan perangkat Desa;
12. Penetapan yang berhak menggunakan hak pilih dalam pemilihan perangkat Desa;
13. Penentuan tanda gambar calon, pelaksanaan kampanye, cara pemilihan dan biaya pelaksanaan pemilihan perangkat Desa;<sup>31</sup>



---

<sup>31</sup>HAW.Widjaja, *otonomi Desa, merupakan otonomi yang asli, bulat dan utuh* (PT.RajaGrafindo), 2003.hal.93- 97



## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah menggunakan pendekatan deskriptif dengan metode kualitatif, Bogan dan Taylor mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tilisan atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.<sup>32</sup> Sedangkan tujuan dari penelitian kualitatif menurut Sulisty Basuki ialah bertujuan untuk memperoleh gambaran seutunya mengenai suatu hal menurut pandangan manusia yang diteliti. Penelitian kualitatif berhubungan dengan ide, persepsi, dan pendapat.<sup>33</sup>

Sedangkan menurut Prastowo penelitian Kualitatif menekankan pada analisis induktif, deduktif. Pada penelitian ini, peneliti mengembangkan konsep dan menghitung fakta, tetapi tidak melakukan pengujian hipotetis melalui perhitungan angka-angka. Penelitian ini cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Pemeilihan pendekatan dalam penelitian tergantung pada jenis penelitian yang akan dilaksanakan.

Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data tidak dipandu oleh teori, tetapi dipandu oleh fakta-fakta yang ditemukan pada saat penelitian di lapangan. Oleh karena itu, penelitian membiarkan permasalahan-permasalahan muncul atau dari data dibiarkan terbuka untuk interprestasi. Kemudian data dihimpun dengan pengamatan yang seksama, meliputi deskripsi yang mendetail disertai catatan-catatan hasil wawancara yang mendalam (*interview*), serta hasil analisis dokumen dan catatan-catatan.

Berdasarkan penguraian diatas penggunaan data kualitatif dapat menghasilkan data yang deskriptif tentang strategi pembangunan jangka menengah yang dilakukan di Dusun Riso, Desa Pinang, Kabupaten Enrekang.

---

<sup>32</sup> Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung, Remaja Rosdakarya, 2002), hal.9

<sup>33</sup> Basuki Sulisty, *Metode Penelitian* (Jakarta: Wedatama Widya Sastra, 2000), hal.32

## **B. Lokasi Penelitian**

### ***Lokasi Penelitian***

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Enrekang, kemudian sasaran utamanya adalah pemerintah daerah kemudian masyarakat kabupaten enrekang lebih tepatnya dusun Riso Desa Pinang yang berjumlah 350 Kepala keluarga.

Ada tiga unsur penting yang harus dipertimbangkan dalam menetapkan lokasi penelitian yaitu tempat, pelaku dan kegiatan.<sup>34</sup> Penelitian ingin mengetahui upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi daerah yang merancang Pembangunan jangka menengah daerah di Kabupaten Enrekang, dan apakah penerapan dari Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang RPJMD tersebut sudah berjalan ataukah malah sebaliknya.

Peneliti memilih lokasi tersebut untuk dijadikan lokasi penelitian karena Pemerintah atau aparatur masih termaksud wilayah terbelakangan dalam masalah pengembangan wilayah yang jarang digarap tentunya.

## **C. Pendekatan Penelitian**

Ada beberapa pendekatan yang peneliti gunakan dalam penelitian ini, antara lain:

### ***1. Pendekatan Yuridis***

Berdasarkan permasalahan dan tujuan penelitian diatas penulis menggunakan pendekatan sosial yuridis, yaitu pendekatan yang digunakan untuk melihat gejala-gejala sosial yang berkaitan dengan hukum dalam

---

<sup>34</sup> S. Nasution, *Metode Naturalisasi Kualitatif* (Bandung: Tarsinto, 1996), hal. 43

praktek legislasi di Indonesia. Pendekatan sosial yuridis mengkaji bagaimana ketentuan norma diwujudkan senyatanya dimasyarakat<sup>35</sup>.

## **2. Pendekatan Normatif**

Peneliti juga menggunakan metode pendekatan Normatif dimana, menggunakan data sekunder sabagai sumber tambahan, berupa berbagai peraturan perundang-undangan dan referensi dokumen lain yang terkait dengan pengkajian, penelitian dan proses legislasi.<sup>36</sup>

## **D. Sumber Data**

### **1. Sumber data primer**

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah pemerintah daerah sebagai Informan kunci (*key Informan*). Adapun informan tambahan yaitu masyarakat di Kabupaten Enrekang itu sendiri khususnya Desa Riso. Ketika proses penelitian berlangsung melalui informan yang dipilih belum memperoleh data yang diinginkan, jumlah informan bisa saja berkembang hingga titik jenuh.

### **2. Sumber data Sekunder**

Sumber data sekunder dalam penelitian lapangan merupakan sumber data pendukung dari sumber data primer yang telah diperoleh. Sumber data sekunder dapat dibagi menjadi: *pertama*, kajian kepustakaan konseptual yaitu kajian terhadap artikel-artikel atau buku-buku yang ditulis oleh para ahli yang ada hubunganya dengan pembahasan judul penelitian ini. *Kedua*, kajian kepustakaan dari hasil penelitian terdahulu atau penelusuran hasil penelitian terdahulu yang relevansinya dengan pembahasan penelitian ini, baik yang telah diterbitkan maupun yang tidak diterbitkan dalam bentuk buku atau

---

<sup>35</sup>Jurnal RECHTSVINDING, Noor Muhammad Aziz , S.H.,M.H.,M.M. *Urgensi Penelitian dan Pengkajian Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan* vol.1 No.1 Januari-April 2012.

<sup>36</sup>Soerjono Soekanti dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta, CV. Rajawali,1990),hal.15.

majalah ilmiah. Sumber data sekunder terdiri dari bahan pustaka, literatur, penelitian terdahulu, buku, situs di internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan dan lain sebagainya<sup>37</sup>

#### **E. Instrumen Penelitian**

Instrumen utama dalam penelitian kualitatif adalah penelitian sendiri, yakni penelitian yang berperan sebagai perencana, pelaksanaan, menganalisis, menafsirkan data hingga pelaporan hasil penelitian. Peneliti sebagai instrumen harus dapat berkemampuan dalam menganalisis data. Barometer keberhasilan suatu penelitian tidak lepas dari instrument yang digunakan, instrument yang digunakan dalam penelitian lapangan ini meliputi: kamera, alat perekam, dan buku catatan.

#### **F. Metode Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini, penulis memahami terlebih dahulu akan metode penelitian kualitatif, penguasaan bidang yang akan diteliti, kesiapan penulis untuk memasuki objek Penelitian dan bagaimana tahap penelitian awal. Pada tahap ini penulis yang menjadi atau instrumen atau *human instrument*.<sup>38</sup> Sebagai kunci dalam penelitian untuk mendapat informasi awal tentang situasi dilakukan dengan cara mengamati langsung terhadap obyek penelitian. Setelah penulis mengetahui dan mendapatkan informasi awal maka selanjutnya pengembangan instrument. Dalam pengembangan instrument penulis menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi.

---

<sup>37</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan RAD* (Cet.VIII;Bandung:Alfabeta,2009),hal.137

<sup>38</sup>Suharmisi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktisi*, h.213

## 1. *Observasi*

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis, mengenai fenomena social dengan gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan<sup>39</sup> menurut sutrisno hadi, observasi adalah meode ilmiah yang diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan dengan sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki. Sedangkan Suharsimi Arikunto mengemukakan bahwa observasi atau yang disebut juga dengan pengamatan meliputi kegiatan pemusatan perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan segala indra.<sup>40</sup>

Metode observasi ini peneliti gunakan untuk mendapatkan data tentang masalah pergaulan bebeas melalui pengamatan, peneliti terjun langsung ke lapangan dan mencari sumber fakta peraturan tentang rencana pembangunan jangka menengah yang dilakukan di dusun Riso Kabupaten Enrekang. Dimana observasi ini berpartisipasi dalam usaha-usaha apa saja yang dilakukan kepala desa maupun kepala dusun dalam melakukan RPJM tersebut.

## 2. *Wawancara (interview)*

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan itu dilakukan oleh dua orang pihak, yaitu pewawancara (*interview*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewer*) yang meberikan jawaban atas pertanyaan itu<sup>41</sup> maksud mengadakan wawancara, seperti ditegaskan oleh Lincoln dan Guba antara lain: mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian, dan lain-lain, wawancara secara garis besarnya dibagi dua yaitu wawancara tidak terstruktur dan wawancara yang terstruktur. Pendekatan wawancara kualitatif yang akan digunakan adalah wawancara konversasional yang informal. Wawancara

---

<sup>39</sup>P. Joko Subagyo, *Metode Penelotian dalam Teori dan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), hal. 63

<sup>40</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Reasearch II*, (Jakarta: Andi Offset,1991), hal.136

<sup>41</sup>Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, hal.186

konversasional yang informal adalah proses wawancara yang didasarkan pada pertanyaan-pertanyaan spontan dalam interaksi alamiah.

Wawancara tidak terstruktur biasa juga disebut wawancara mendalam, wawancara *intensif*, wawancara *kuantitatif*, dan wawancara terstruktur sering juga disebut wawancara baku (*standardized interview*) yang susunan pertanyaannya sudah ditetapkan sebelumnya dengan pilihan-pilihan jawaban yang sudah disediakan<sup>42</sup>

Teknik wawancara yang digunakan penulis dalam mengumpulkan data adalah wawancara terstruktur. Peneliti melakukan wawancara terhadap kepala Dusun dan kepala Desa. Adapun pokok pembahasan didalam wawancara ini yaitu bagaimana Rencana Pembangunan Jangka Menengah di Dusun Riso Desa Pinang Kabupaten Enrekang.

### 3. Dokumentasi

Metode dokumentasi dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh data dengan cara dokumentasi, yaitu mempelajari dokumen yang berkaitan dengan seluruh data yang diperlukan dalam penelitian. Dokumentasi dari asal kata dokumen yang artinya barang-barang tertulis.<sup>43</sup> Metode dokumentasi adalah metode mencari data mengenai variabel yang merupakan catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen, rapat, ledger, dan agenda.<sup>44</sup> Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen biasa berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan

---

<sup>42</sup>Mulyana, *Metode Penelitian Kuantitatif Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan ilmu social lainnya* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), hal. 180

<sup>43</sup>Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Yogyakarta: Bumi Aksara, 2003) hal. 54

<sup>44</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*, hal. 88

(*life History*), cerita, biografi, peraturan, kebijakan, dokumen, yang berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketsa.<sup>45</sup>

Teknik ini penulis gunakan untuk mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan pembahasan melalui pencatatan dokumen yang menyangkut desa. Adapun dokumen yang diperoleh oleh penelitian yaitu buku profil Desa Pinang, Kabupaten Enrekang.



---

<sup>45</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2005), hal.7

## G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Pengolahan data pada penelitian ini, penelitian menggunakan teknik pembahasan induktif, dan deduktif. Untuk menghindari pelebaran makna, dan juga agar tidak menjauh dari pembahasan. Berfikir induktif berangkat dari fakta-fakta yang khusus atau peristiwa-peristiwa yang khusus/konkret itu ditarik generalisasinya yang mempunyai sifat umum. Jadi dapat disimpulkan, bahwa penulisan secara induktif ini adalah dari hal-hal yang bersifat khusus menuju pada hal-hal yang bersifat umum.<sup>46</sup> pembahasan secara deduktif maksudnya adalah berangkat dari fakta yang bersifat umum, kemudian dispesifikasikan menjadi kategori-kategori atau dapat dikatakan bahan penulisan secara deduktif dari hal-hal yang bersifat umum menuju hak-hal yang bersifat khusus. Kemudian teknik *reflectif thinking*, yaitu sebagaimana yang diungkapkan oleh Sutrisno Hadi dalam bukunya “*Metodologo Research*”, berfikir reflektif yaitu dengan cara mengkombinasikan cara berfikir induktif dan cara berfikir deduktif.

Analisa data menurut Patton adalah proses mengatur urutan data mengorganisasikan kedalam sesuatu pola, kategori, dan suatu uraian dasar. Sedangkan menurut Bogdan dan Taylor adalah sebagai proses yang merinci usaha secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan hipotesis (ide), seperti yang disarankan oleh data usaha untuk memberikan bantuan pada teman atau hipotesis. Dari kedua pengertian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori, dan suatu uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat

---

<sup>46</sup>Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid* (Yogyakarta: Andi Offset,1993),hal.42



dirumuskan hipotesis seperti disarankan data.<sup>47</sup> untuk keperluan menganalisis data dalam penelitian ini digunakan teknik analisis sesuai dengan teknik analisis yang sesuai dengan sifat dan jenis data yang ada, serta tujuan dalam pembahasan dalam skripsi ini, yaitu dengan menggunakan analisis data deskriptif, yaitu cara menganalisis dengan pemikiran logis, teliti, sistematis terhadap semua data yang berhasil dikumpulkan dengan mengidentifikasi, kategorisasikan, dan interpretasi.

Data yang diperoleh dari peneliti akan dianalisis agar memperoleh data yang valid untuk disajikan sesuai dengan masalah yang dibahas. Dalam penelitian ini penulis menggunakan tiga tahapan dalam melakukan analisis data, yaitu;

### **1. Reduksi data**

Semua data dilapangan dianalisis sekaligus dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok dan difokuskan pada masalah pokok yang dianggap penting, dicari tema dan polanya sehingga tersusun secara sistematis dan mudah dipahami.<sup>48</sup> data yang telah direduksi kemudian disajikan dalam bentuk laporan penelitian sehingga gambaran akan hasil penelitian lebih jelas.

### **2. Penyajian data**

Dalam hal ini, Miles dan Huberman yang dikutip oleh Sugiyono, mengatakan yang paling sering digunakan untuk menyajikan data

---

<sup>47</sup>Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, dan RAD* (Cet VI; Bandung Alfabeta,2008),hal234

<sup>48</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan, Kuantitatif, Kualitatif, dan RAD* (Cet, VI, Bandung: Alfabeta,2008),hal.234

dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.<sup>49</sup> sedangkan data yang sudah direduksikan dan diklarifikasikan berdasarkan kelompok masalah yang diteliti, sehingga memungkinkan adanya penarikan kesimpulan atau verifikasi dalam penyajian data ini penulis menyajikan hasil penelitian, terdahulu. Penyajian data dalam penelitian bertujuan untuk mengkomunikasikan hal-hal yang menarik dari masalah yang diteliti, metode yang digunakan, penemuan yang diperoleh, penafsiran hasil, dan pengintegrasian dengan teori.

### **3. *Penarikan kesimpulan***

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas. Jadi makna-makna yang muncul dari data harus diuji kebenarannya, kekokohnya, dan kecocokannya yakni yang merupakan validitasnya. Peneliti pada tahap ini mencoba menarik kesimpulan berdasarkan tema untuk menemukan makna dari data dan penulis membuat saran sebagai bagian akhir dari penelitian.

Proses selanjutnya dalam penelitian ini adalah analisis data yang bertujuan untuk menyederhanakan data yang dikumpulkan sehingga memudahkan peneliti untuk menjelaskannya. Jenis analisis yang digunakan adalah jenis data yang bersifat kualitatif, yaitu yang

---

<sup>49</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, hal.92

digambarkan dengan kata-kata atau kalimat yang dipisah-pisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.<sup>50</sup>



---

<sup>50</sup>Husain Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metologi Penelitian Sosial* (Jakarta: BumiAksara,2000),hal.243

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### ***A. Sejarah, Gambaran umum, dan Lokasi Penelitian***

##### **1. Sejarah BAPPEDA ENREKANG (Badan Perencanaan Dan Pendapatan Daerah).**

Pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan di daerah (BAPPEDA) yang merupakan salah satu sarana penting untuk mewujudkan sistem perencanaan yang efektif dan bertanggungjawab. Perencanaan hendaknya mampu menjamin bahwa pembangunan daerah menuju kearah yang tepat dan sesuai dengan tuntutan internal dan eksternal, ditunjang oleh potensi sumber daya yang tersedia. Pembangunan Daerah pada dasarnya merupakan upaya perubahan dalam berbagai bidang dan aktivitas kehidupan masyarakat menuju kearah pertumbuhan kualitas sumber daya manusia. Untuk memenuhi hal ini diperlukan perencanaan yang tepat dan dapat dipercaya dengan menggunakan metode dan prosedur yang dapat dipertanggung jawabkan, baik dalam aspek akademik. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Enrekang merupakan kelembagaan daerah yang mendapat amanat atau mandat untuk melaksanakan fungsi koordinator Perencanaan Pembangunan dalam lingkup organisasi pemerintahan Kabupaten Enrekang.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup><http://bapedaenrekang.wordpress.com/2011/04/14/hello-world/>BAPPEDA ENREKANG, (diakses pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2020)

Untuk lebih mengefektifitaskan kegiatan perencanaan Pembangunan Daerah maka berdasarkan Kepres Nomor 27 Tahun 1980 dibentuklah organisasi BAPPEDA. Selanjutnya dijabarkan dalam Kepmendagri Nomor 185 Tahun 1980 tentang Organisasi dan Tata Kerja BAPPEDA. Sementara dasar Hukum yang dipakai Kabupaten Enrekang selain peraturan diatas juga dipakai Peraturan Derah Nomor 4 Tahun 1982 tentang pembentukan BAPPEDA Kabupaten Enrekang yang tipe C. Selanjutnya diperbaharui dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 7 Tahun 2008 tentang pembentukan, susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Enrekang.

Dalam rangka implementasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), BAPPENDA dituntut untuk lebih mandiri sesuai dengan semangat Desentralisasi dan Otonomi Daerah. Koordinasi dengan para pengguna dan perencana dalam berbagai bidang perlu diteruskan ditingkatkan kearah yang lebih produktif. Kemampuan kelembagaan masih belum memadai untuk menghasilkan produk-produk perencannan yang valid dan berkualitas. Dengan demikian pengembangan kelembagaan (dalam arti luas) masih perlu dilakukan dimasa datang.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup><http://bapedaenrekang.wordpress.com/2011/04/14/hello-wold/>BAPPEDA ENREKANG, (diakses pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2020)

## **2. Gambaran umum kondisi Daerah, Aspek Geografi dan Demografi.**

### ***a. Gambaran umum dan Aspek Geografis***

Secara geografis Kabupaten Enrekang berada di jantung jazirah Sulawesi Selatan yang dalam peta batas wilayah memang bentuknya seperti jantung. Pegunungan Latimijong yang memajang dari Utara ke Selatan rata-rata ketinggian  $\pm 3.000$  meter di atas permukaan laut, memagari Kabupaten Enrekang di sebelah Timur sedangkan disebelah Barat membentang Sungai Saddang dari Utara ke Selatan yang pengendalian airnya menentukan pengairan Saddang yang berada dalam wilayah Kabupaten Pinrang dengan aliran pengairan sampai ke Kabupaten Sidenreng Rappang.

Kabupaten Enrekang secara administrasi terdiri dari 12 Kecamatan yang tersebar dalam 112 Desa dan 17 Kelurahan dan memiliki luas wilayah sekitar 1.784,93 km<sup>2</sup> atau 178.601 Ha. Luas wilayah Kabupaten Enrekang adalah  $\pm 2.83\%$  dari wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.

Kabupaten Enrekang terletak sekitar  $\pm 240$  Km di sebelah Utara Kota Makassar atau terletak antara  $3^{\circ}14'36''$  -  $3^{\circ}50'00''$  Lintang Selatan dengan  $119^{\circ}40'53''$  -  $120^{\circ}6'33''$  Bujur Timur dengan ketinggian bervariasi antara 47 meter sampai 3.329 Meter di atas permukaan laut dengan batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Tana Toraja;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Luwu;

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Pinrang

Selama setengah dasawarsa terjadi perubahan administrasi pemerintahan baik tingkat kecamatan maupun pada tingkat Kelurahan/Desa, yang pada awal tahun 1995 hanya dimana kabupaten Enrekang hanya memiliki 5 Kecamatan dan 54 Desa/Kelurahan, namun dalam perkembangannya selanjutnya Kabupaten Enrekang pada saat ini

Di Kabupaten Enrekang terdapat 3 stasiun curah hujan yang dapat memonitori keadaan curah hujan sepanjang tahun di Kabupaten Enrekang, yaitu stasiun Kalosi, stasiun Enrekang, dan stasiun Baraka. Stasiun Enrekang termasuk dalam tipe iklim C1, stasiun Kalosi digolongkan sebagai tipe E1, dan stasiun Baraka tergolong dalam tipe D1.

Di Kabupaten Enrekang termasuk daerah yang memiliki curah hujan tinggi, dengan rata-rata curah pertahun dalam kurun waktu tiga tahun terakhir (2015-2017) sebesar 2568 mm/th. Sama halnya di Kabupaten Lainnya yang berada di Sulawesi Selatan, Enrekang merupakan wilayah yang letak geografisnya lebih tinggi di sekitar daratan sulawesi.

**Tabel 2.1.1**

Luas Wilayah Efektif Menurut Kecamatan Di Kabupaten Enrekang

Tahun 2017

| <b>kode</b>        | <b>Kecamatan<br/>District</b> | <b>Luas<br/>Kawasan<br/>permukiman</b> | <b>%</b>   | <b>Luas<br/>Wilayah/Kecamatan<br/>(Km2)</b> |
|--------------------|-------------------------------|--|------------|---|
| <b>(1)</b>         | <b>(2)</b>                    | <b>(3)</b>                             | <b>(5)</b> | <b>(6)</b>                                  |
| 010                | Maiwa                         | 344,83                                 | 11,47      | 392.87                                      |
| 011                | Bungin                        | 61,49                                  | 2,05       | 236.84                                      |
| 020                | Enrekang                      | 335,85                                 | 11,18      | 291.19                                      |
| 021                | Cendana                       | 90,00                                  | 2,99       | 91.01                                       |
| 030                | Baraka                        | 553,48                                 | 18,48      | 159.15                                      |
| 031                | Buntu Batu                    | 203,44                                 | 6,77       | 126.65                                      |
| 040                | Anggeraja                     | 184,44                                 | 6,14       | 125.34                                      |
| 041                | Malua                         | 240,18                                 | 7,99       | 40.36                                       |
| 050                | Alla                          | 300,74                                 | 10,01      | 34.66                                       |
| 051                | Curio                         | 409,48                                 | 13,62      | 178.51                                      |
| 052                | Massalle                      | 176,34                                 | 5,87       | 68.35                                       |
| 053                | Baroko                        | 105,08                                 | 3,50       | 41.08                                       |
| Kabupaten Enrekang |                               | 3.005,34                               | 100,00     | 178.601                                     |

Sumber : Kabupaten Enrekang Dalam Angka 2018

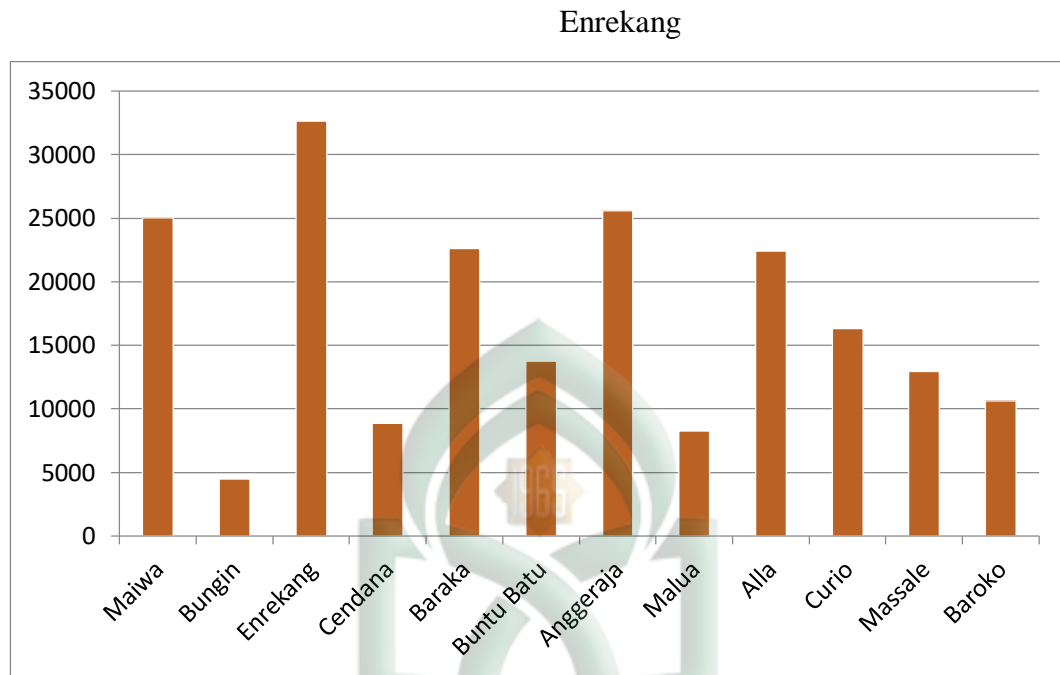


### ***b. Kondisi Demografi***

Jumlah penduduk Kabupaten Enrekang terus mengalami peningkatan sejak tiga tahun terakhir, yakni tahun 2015 hingga tahun 2017. Pada tahun 2015 penduduk Kabupaten Enrekang berjumlah 199.998 jiwa kemudian meningkat menjadi 201.614 jiwa dan di tahun 2017 jumlahnya meningkat menjadi 203.320 jiwa. Pertumbuhan jumlah penduduk disebabkan oleh meningkatnya angka kelahiran. Peningkatan jumlah tersebut sebenarnya tidak merata pada setiap kecamatan. Ada kecamatan yang jumlahnya lebih besar dibanding dengan kecamatan lain seperti Kecamatan Enrekang dengan jumlah penduduk sebanyak 32.461 jiwa. Besarnya penduduk di Kecamatan Enrekang karena Kecamatan Enrekang merupakan letak Ibu Kota Kabupaten, dan umumnya jumlah penduduk yang tinggi akan terkonsentrasi di daerah perkotaan. Dari sebaran penduduk pada 12 Kecamatan di Kabupaten Enrekang, Kecamatan Bungin memiliki jumlah penduduk yang paling sedikit yaitu hanya sebesar 4.464 jiwa. Kecamatan bungin ini merupakan Kecamatan yang relatif baru di Kabupaten Enrekang karena merupakan hasil pemekaran dari Kecamatan Maiwa yang letaknya kurang lebih 65 km dari Ibu Kota Kabupaten.

**Gambar 2.1.2**

Jumlah Penduduk Per-Kecamatan Tahun 2017 Kabupaten



Sumber : Kabupaten Enrekang Dalam Angka, 2018

### **3. Langkah Pemerintah Daerah dalam melaksanakan RPJMD di Kabupaten Enrekang.**

Pelaksanaan penyusunan RPJMD Kabupaten Enrekang dilaksanakan melalui beberapa tahapan diantaranya persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, pelaksanaan musrenbang, perumusan rancangan akhir, dan penetapan Peraturan Daerah tentang RPJMD. Setiap tahapan penyusunan dilalui dengan melaksanakan pertemuan dan diskusi dengan seluruh perangkat daerah dan berbagai pihak yang berkepentingan, serta melaksanakan konsultasi publik terhadap rancangan awal.

Selanjutnya RPJMD Kabupaten Enrekang akan dijabarkan kedalam Rancangan Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Enrekang yang memuat Rancangan kerangka Ekonomi Daerah, priritas Pembangunan Daerah, serta Rencana Kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan program strategis Nasional. RPJMD Kabupaten Enrekang dilengkapi dengan matriks indikasi program yang merinci tujuan beserta indikator dan targetnya, kebijakan dan perogram untuk masing-masing misi Pembangunan Daerah Kabupaten Enrekang<sup>3</sup>

#### 4. *Gambaran Keuangan Daerah*

Dalam Permendagri 86 Tahun 2017, pengertian Kauangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubunga dengan hak dan kewajiban Daerah. Terkait dengan batasan tersebut, maka setiap periode Pemerintahan Daerah, analisis tentang hak dan kewajiban Daerah yang telah dinilai dengan uang yang perlu dilakukan.

Analisis Keuangan Daerah dimaksud diatas untuk memperoleh gambaran tentang kemampuan fisikl Pemerintahan Daerah dalam mendanai penyelenggaraan Pembangunan Daerah. Gambaran kemampuan fisikl suatu Daerah tercermin dalam dokumen anggaran pendapatan dan belanja daerah.

---

<sup>3</sup>PERDA-NO-1-TAHUN-2019-RPJMD TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2018-2023, (diakses pada hari minggu tanggal 14 juni 2020)

(APBD) dan laporan neraca daerah. Untuk mengetahui keuangan maka diperlukan analisis terkait pendapatan daerah beserta rinciannya, belanja daerah beserta rinciannya, dan pembiayaan daerah meliputi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Realisasi pendapatan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengumpulkan sumber-sumber pendapatan baik yang berasal dari dalam daerah sendiri maupun pendapatan yang bersumber dari dana transfer, serta lain-lain pendapatan yang sah. Semakin besar pendapatan yang dapat diperoleh untuk mendanai program penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Selama periode 2014-2018, realisasi pendapatan daerah Kabupaten Enrekang mengalami peningkatan setiap tahunnya kecuali pada tahun 2017. Pada tahun 2014, realisasi pendapatan daerah sebesar Rp 737,11 milyar meningkat cukup signifikan menjadi Rp 1013,31 milyar pada tahun 2018. Penurunan realisasi pendapatan daerah pada tahun 2017 terutama dikontibusikan oleh penurunan dana perimbangan sebesar Rp 68,1 milyar dari angka realisasi tahun sebelumnya. Rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah dalam kurung waktu 2014-2018 tercatat sebesar 8.81 persen per tahun.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup>PERDA-NO-1-TAHUN-2019-RPJMD TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2018-2023, (diakses pada hari senin tanggal 15 juni 2020)

**Gambar 2.1.3**

Rata-rata Pertumbuhan Pendapatan Daerah Kabupaten Enrekang 2014-  
2018

| NO    | URAIAN  | 2014   | 2015   | 2016   | 2017    | 2018    | Rata-rata pertumbuhan |
|-------|---|--------|--------|--------|---------|---------|-----------------------|
|       |   | milyar | milyar | Milyar | milyar  | Milyar  |                       |
| 1     | Pendapatan  | 737.11 | 919.86 | 1033.3 | 1000.41 | 1013.31 | 8.81                  |
| 1.1   | PAD   | 35.00  | 49.21  | 56.38  | 99.67   | 77.09   | 27.33                 |
| 1.1.1 | Pajak Daerah                                      | 6.07   | 7.34   | 9.15   | 9.02    | 13.50   | 23.45                 |
| 1.1.2 | Retribusi Daerah                                  | 13.39  | 15.56  | 19.88  | 26.04   | 20.99   | 13.88                 |
| 1.1.3 | Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan | 2.91   | 3.39   | 4.83   | 12.36   | 13.80   | 56.63                 |
| 1.1.4 | Lain-lain PAD yang sah                            | 12.62  | 22.93  | 22.53  | 52.25   | 28.80   | 41.74                 |
| 1.2   | Dana Perimbangan                                  | 550.82 | 716.85 | 833.12 | 765.02  | 767.52  | 9.63                  |
| 1.2.1 | DHB Pajak/bukan pajak                             | 19.80  | 18.17  | 24.80  | 16.93   | 15.52   | (2.95)                |
| 1.2.2 | DAU   | 480.89 | 562.16 | 543.89 | 534.34  | 534.34  | 2.76                  |
| 1.2.3 | DAK   | 50.13  | 172.53 | 264.43 | 213.75  | 217.66  | 70.02                 |
| 1.3   | Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah              | 151.30 | 153.80 | 143.86 | 135.72  | 168.70  | 3.46                  |
| 1.3.1 | Hibah   | 61     | 6.05   | 1.83   | 6.53    | 34.00   | 376.73                |

|       |   |        |        |        |       |       |         |
|-------|---|--------|--------|--------|-------|-------|---------|
| 1.3.2 | Dana Darurat  | -      | -      | -      | -     | -     | -       |
| 1.3.3 | DHB Pajak dari provinsi dan pemerintahan daerah lainnya       | 22.55  | 27.55  | 31.38  | 36.07 | 33.06 | 10.66   |
| 1.3.4 | Dana penyesuaian dan Otonom khusus                            | 117.31 | 108.70 | 103.33 | 89.13 | 97.51 | (4.15)  |
| 1.3.5 | Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya | 10.84  | 11.49  | 7.32   | 4.00  | 4.13  | (18.06) |

Sumber : Perda Pertanggungjawaban APBD Kabupaten Enrekang

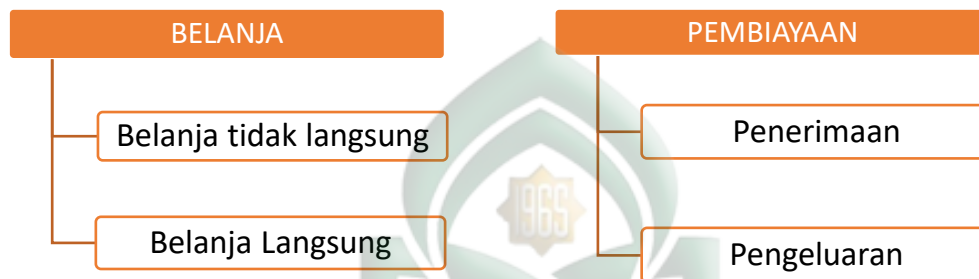
Dari data diatas menjelaskan bahwa pendapatan daerah setiap tahunnya meningkat dan juga telah diuraikan kedalam pendanaan KAS daerah, pajak, maupun dana non-pajak. Tabel diatas juga menerangkan bahwa bantuan keuangan dari provinsi dari tahun 2014-2018 memiliki rata-rata pertumbuhan yang melonjak yakni sekitar 15persen dari empat tahun sebelumnya, sehingga pemerintah kabupaten enrekang dapat melakukan infrastrktur untuk kemajuan pembangunan.

Pencapaian realisasi pendapatan daerah pada priode 2014-2018 tidak terlepas dari sejumlah kebijakan yang telah dilakukan pada periode sebelumnya terutama kebijakan eksistensi dan intensifikasi pendapatan daerah. Peningkatan pendapatan daerah dalam periode 2014-2018 berimplikasi terhadap peningkatan pendapatan daerah dalam lima tahun kedepan.

## 5. *Pengertian APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah)*

### 1. **Anggaran Pendapatan Belanja Daerah**

APBD merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang memuat rencana penerimaan, peneluaran, dan pembiayaan daerah selama satu tahun adapun struktur APBD dibawah ini :



Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekualitas dana, yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan daerah dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan. Pendapatan daerah dikelompokkan atas pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

Adapun struktur pendapatan meliputi :



Klarifikasi belanja menurut fungsi digunakan untuk tujuan keselarasan dan keterpaduan pengelolaan keuangan, terdiri dari :

- Pelayanan umum
- Ketertiban dan ketentraman
- Ekonomi
- Lingkungan hidup
- Perumahan dan fasilitas umum
- Kesehatan
- Pariwisata dan budaya
- Pendidikan
- Perlindungan sosial



Adapun instrumen Hukum yang peneliti gunakan dalam menyusun penelitian di atas yaitu :

- KEPRES Nomor 27 Tahun 1980, pembentukan Organisasi BAPPEDA
- PERMENDAGRI 86 TAHUN 2017, pengertian Keuangan Daerah
- KEPMENDAGRI Nomor 185 Tahun 1980 tentang Organisasi dan Tata Kerja BAPPEDA
- PERDA (Peraturan Daerah) Nomor 4 Tahun 1982 Tentang Pembentukan BAPPEDA Kabupaten, selanjutnya di perbaharui dengan Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 7 Tahun 2008 Tentang pembentukan susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Enrekang.
- PERDA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang RPJMD (Rencana Jangka Menengah Daerah) Tahun 2018-2023.

Terlepas dari pengaruh anggaran pendapatan daerah di kabupaten adapun visi, misi dari Kabupaten Enrekang itu sendiri iyalah **“Terwujudnya Enrekang Maju, Aman dan Sajahtera (EMAS) yang Berkenjutan dan Religius”**, dan juga meningkatkan kualitas infrastruktur, kualitas SDM, tata kelola, skala usaha, pengelolaan sumber daya alam secara baik dan optimal.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup>PERDA-NO-1-TAHUN-2019-RPJMD TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2018-2023, (diakses pada hari Senin tanggal 15 juni 2020)

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang peneliti lakukan tentang *Tinjauan Yuridis Perda Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Rancangan Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di Kabupaten Enrekang*. Maka dapat disimpulkan bahwa:

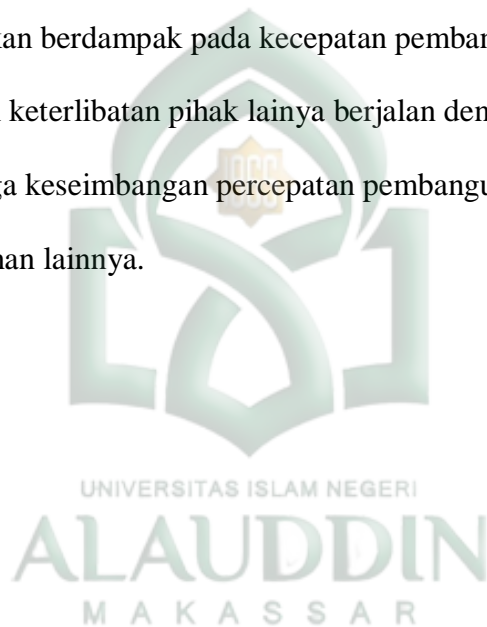
1. Pemerintah di Kabupaten Enrekang telah melakukan Pembangunan sesuai dengan apa yang tercantum dalam PERDA NO. 7 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DI KABUPATEN ENREKANG
2. Peran Kepala Daerah dalam hal ini telah berperan secara maksimal dalam mengelola aset daerah Kabupaten Enrekang dan juga dalam pembangunan, pendanaan, dan juga perpajakan dimana akuntabilitas dan transparansi baik di instansi manapun di masyarakat berjalan dengan semestinya.

#### **B. Saran**

1. Untuk lebih meningkatkan kesejahteraan rakyat dalam hal pembanguna, dan juga pajak daerah. Pembangunan akan tepat mengenai sasaran, terlaksana dengan baik dan bermanfaat jika dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Pembangunan harus dilaksanakan deri masyarakat, oleh

masyarakat dan untuk masyarakat. Pentingnya masyarakat dilibatkan dalam pelaksanaan pembangunan sebagai bentuk apresiasi bahwa tujuan itu sendiri untuk mensejahterakan masyarakat.

2. Mengadakan sarana dan juga prasarana khususnya di daerah terpencil yang belum di jamah oleh pemerintah setempat. Hal ini untuk meningkatkan efesiensi dan efektivitas belanja daerah dan juga akan berdampak pada kecepatan pembangunan infrastruktur dengan keterlibatan pihak lainya berjalan dengan baik. Untuk menjaga keseimbangan percepatan pembangunan antara desa dan kelurahan lainnya.



## DAFTAR PUSTAKA

- Aayhadie Zaeni dan Rahman Arief dan Mualifah. *pengantar Hukum Indonesia*, PT.RajaGrafindoPersada
- Ayarifin Pipin dan Jubaedah Dedah. 2006. *PEMERINTAHAN DAERAH DI INDONESIA*, CV. PUSTAKA SETIA BANDUNG
- Chalid Peni. 2005. *OTONOMI DAERAH MASALAH, PEMBERDAYAAN, DAN KONFLIK*, Perpustakaan Nasional RI: Katalog Dalam Terbitan
- Dimock.Fox.Dimock. 2003.*Administrasi Negara* edisi kelima jilid 2, PT. Gelora Aksara Pratama, penerbit *ERLANGGA*
- Huda Ni'Matul. 2010. *Ilmu Negara*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Huda Ni'Matul.2005. *Hukum Tata Negara Indonesia*.Jakarta: PT RajaGrafindo persada
- Huda Ni'matul. 2005. *Otonomi daerah filosofis, Sejarah Perkembangan dan problemaik*, PUSTAKA PELAJAR.
- Hadi Sutrisno. 1993. *Metodologi Research Jilid I*, Yogyakarta: Andi Offset
- Hadi Sutrisno. 1991. *Metodologi Reasearch II*, Jakarta: Andi Offset.
- Inu Kencana Syafiie. 1993.*Ilmu Pemerintahan* Yogyakarta: Andi Offset
- Joerito R. *Perkembangan pemerintah lokal* , PT. penerbit alumni.

Kumorotomo Wahyudi. 2000. *Etika Administrasi Negara*, PT. RajaGrafindo Persada.

Moleong J Lexy. 2008. *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, dan RAD*, Cet VI; Bandung.

MuLyana. 2002. *Metode Penelitian Kuantitatif Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan ilmu social lainnya*, Bandung: Remaja Rosdakarya.

Moleong J Lexy. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif* Bandung, Remaja Rosdakarya.

Nasution.S. 1996. *Metode Naturalisasi Kualitatif* Bandung: Tarsinto.

Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Pendidikan, Kuantitatif, Kualitatif, dan RAD*, Cet, VI, Bandung: Alfabeta.

Sukardi. 2003. *Metedologi Penelitian Pendidikan*, Yogyakarta: Bumi Aksara.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*.

Subagyo P. Joko. 1997 *Metode Penelotian dalam Teori dan Praktek* Jakarta: Rineka Cipta'.

Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan RAD* Cet. VIII; Bandung: Alfabeta

Soekanti Soerjono dan Mamudji Sri. 1990. *Penelitian Hukum Normatif: suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta, CV. Rajawali.

Sulistyo Basuki. 2000. *Metode Penelitian* Jakarta: Wedatama Widya Sastra.

SJAFRIZAL. 2014. *Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi*, PT. Grafindo Persada, Jakarta.

Solihin Dadang dan Marhayudi Putut. 2002. *Panduan lengkap otonomi Daerah*, penerbit ISMEE.

Usman Husain dan Akbar Setiadi Purnomo.2002. *Metologi Penelitian Sosial*, Jakarta: BumiAksara.

Padmuji.S .*Ekologi Administrasi Negara*, PT. BINA AKSARA.

Widjaja. HAW. 2003. otonomi Desa, merupakan otonomi yang asli,bulat dan utuh, PT.RajaGrafindo.

#### REFERENSI LAIN

Jurnal RECHTSVINDING, Noor Muhammad Aziz , S.H.,M.H.,M.M. *Urgensi Penelitian dan Pengkajian Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan* vol.1 No.1 Januari-April 2012.

<http://id.m.wikipedia.org>, *Sejarah Indonesia(1945-1949)*, (diakses pada hari Jumat tanggal 12 Oktober 2019)

<http://kompasiana.com>, *Sistem pemerintahan presidensial dan parlementer*, (diakses pada hari Jumat tanggal 12 Oktober 2019)

<https://www.sumberpengertian.id>, *pengertian implemtasi menurut para ahli*, (diakses pada hari minggu 03 November 2019)

<http://peraturan.bpk.go.id>, *perda kabupaten enrekang nomor 7 tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah*, (diakses pada hari minggu, 03 November 2019)

<http://brainly.co.id/tugas/29101113>, *isi kandungan surat An-Nur Ayat 55*, (diakses pada Hari Rabu tanggal 17 Juni 2020)

PERDA NO 1 TAHUN 2019 RPJMD TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2018-2023

**L**

**A**

**M**

**P**

**I**

**R**

**A**

**N**



## LAMPIRAN 1

### PEDOMAN WAWANCARA

1. Apa pendapat bapak sebagai seorang ASN dalam menyikapi transparansi masalah pendanaan dan pembangunan di Kabupaten Enrekang?

Jawab:

2. Bagaimana kinerja yang dilakukan pemerintah untuk menunjang kemajuan Kabupaten Enrekang?

Jawab:

3. Apakah pembangunan yang ada di Kabupaten Enrekang ini sudah termasuk pembangunan yang diharapkan oleh masyarakat Kabupaten Enrekang?

Jawab:

4. Apakah Perda No 7 Tahun 2014 tentang RPJMD sudah berjalan semestinya?

Jawab:

5. Apakah visi, misi, yang dilakukan oleh pemerintah sudah mencakupi segala pembangunan, SDM, pendidikan di Kabupaten Enrekang?

Jawab:

6. Apa sajakah visi, misi yang tertera dalam Perda No. 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah di Kabupaten Enrekang?

Jawab:

7. Apakendala yang dihadapi pemerintah dalam menjalankan pembangunan di Kabupaten Enrekang?

Jawab:



## LAMPIRAN 2

### KEGIATAN DI LOKASI PENELITIAN

#### 1. Proses wawancara di Kantor BAPPEDA



#### 2. Proses wawancara di kantor BAPPEDA



3. Foto bersama Bapak Staf fungsi AKPD ahli Pertama, Supriadi S. Sos, ME dan Ibu Kasubag Money dan Pelaporan, Marwa S.Si



4. Nampak dari depan bangunan Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten Enrekang.

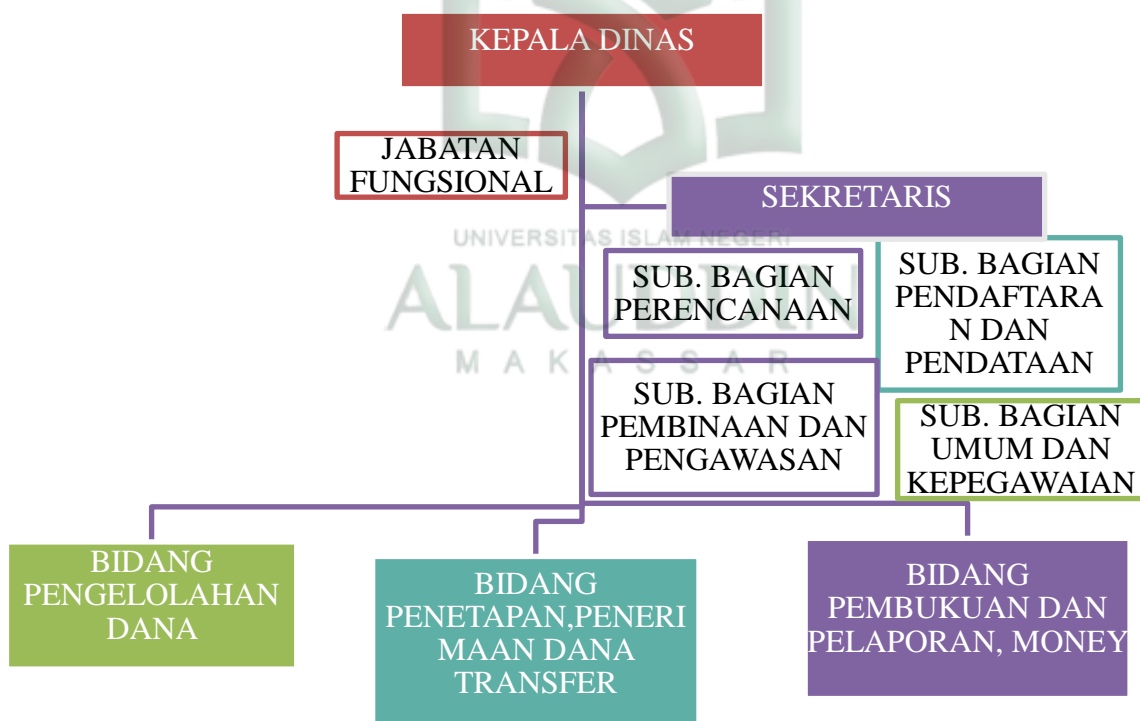


**5. Foto sedang berdiskusi bersama pegawai BAPENDA (Badan Pendapatan Daerah)**





## 6. STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG





## 7. Lembar laporan : Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Enrekang dari Tahun 2014-2017

| LAPORAN TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG<br>JAMPAI DENGAN BULAN DESEMBER 2015 (JITELAN PERUBAHAN) |   |                     |                   |                        |                       |                   |                 |                  |                             |        |
|--|---|---------------------|-------------------|------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------|------------------|-----------------------------|--------|
| NO   | JENIS<br>PENDAPATAN                           | TARGET 2015<br>(Rp) | R E A L I S A S I |                        |                       | %                 | SELISIH<br>(Rp) | KODE<br>REKENING | KETERANGAN<br>(LEAD SEKTOR) | REVISI |
|  |   |                     | BULAN INI<br>2015 | J D BULAN LALU<br>2015 | J D BULAN INI<br>2015 |                   |                 |                  |                             |        |
| I  |   |                     |                   |                        |                       |                   |                 |                  |                             |        |
| PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   |   |                     |                   |                        |                       |                   |                 |                  |                             |        |
| 1  | Pajak Hotel                                   | 10.000.000,00       | 2.276.000,00      | 13.245.000,00          | 15,22                 | 5.523.500,00      | 411.01          | DPKAD            |                             |        |
| 2  | Pajak Restoran                                | 50.000.000,00       | 6.683.000,00      | 47.586.000,00          | 106,84                | 4.269.000,00      | 411.02.01       | DPKAD            |                             |        |
| 3  | Pajak Hiburan                                 | 7.000.000,00        | 6.600.000,00      | 6.500.000,00           | 92,86                 | -500.000,00       | 411.03          | DPKAD            |                             |        |
| 4  | Pajak Reklame                                 | 83.000.000,00       | 41.703.240,00     | 93.324.940,00          | 112,31                | 11.621.700,00     | 411.04          | DPKAD            |                             |        |
| 5  | Pajak Pemungutan Jalan (PPJ)                  | 3.400.000.000,00    | 708.70.889,00     | 2.864.613.756,00       | 92,14                 | -2.675.289.111,00 | 411.05.01       | DPKAD            |                             |        |
| 6  | Pajak Mineral Bukan Logam & Batuan            | 1.000.000.000,00    | 856.440.148,00    | 650.397.470,00         | 75,68                 | -349.642.529,00   | 411.06.01       | DPKAD            |                             |        |
| 7  | Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan & Perkotaan | 2.500.000.000,00    | 108.443.328,00    | 1.740.497.81,00        | 6,95                  | -1.739.502.171,00 | 411.07.01       | DPKAD            |                             |        |
| 8  | BNP/B   | 80.000.000,00       | 83.640.000,00     | 73.893.000,00          | 89,37                 | -8.107.000,00     | 411.13.01       | DPKAD            |                             |        |
| Jumlah   |   | 7.100.000.000,00    | 1.048.990.397,00  | 2.894.390.327,00       | 15,22                 | -5.201.009.603,00 |                 |                  |                             |        |
| II   |   |                     |                   |                        |                       |                   |                 |                  |                             |        |
| PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   |   |                     |                   |                        |                       |                   |                 |                  |                             |        |
| 1  | Retribusi Pelayanan Kesehatan                 | 10.000.000,00       | 3.276.000,00      | 13.245.000,00          | 15,22                 | 5.523.500,00      | 411.01          | DPKAD            |                             |        |
| 2  | Retribusi Pelayanan Kesehatan Air             | 7.000.000,00        | 5.890.000,00      | 6.500.000,00           | 92,86                 | -500.000,00       | 411.03          | DPKAD            |                             |        |
| 3  | Retribusi Pasar                               | 8.000.000,00        | 6.890.000,00      | 7.500.000,00           | 93,75                 | -500.000,00       | 411.04          | DPKAD            |                             |        |
| 4  | Retribusi Tempat Parkir                       | 10.000.000,00       | 3.276.000,00      | 13.245.000,00          | 15,22                 | 5.523.500,00      | 411.05          | DPKAD            |                             |        |
| 5  | Retribusi Pemungutan Jalan (PPJ)              | 3.400.000.000,00    | 708.70.889,00     | 2.864.613.756,00       | 3,24                  | -2.675.289.111,00 | 411.05.01       | DPKAD            |                             |        |
| 6  | Pajak Mineral Bukan Logam & Batuan            | 1.000.000.000,00    | 856.440.148,00    | 650.397.470,00         | 65,04                 | -349.642.529,00   | 411.06.01       | DPKAD            |                             |        |
| 7  | Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan & Perkotaan | 2.500.000.000,00    | 108.443.328,00    | 1.740.497.81,00        | 7,16                  | -1.739.502.171,00 | 411.07.01       | DPKAD            |                             |        |
| 8  | BNP/B   | 80.000.000,00       | 83.640.000,00     | 73.893.000,00          | 92,23                 | -8.107.000,00     | 411.13.01       | DPKAD            |                             |        |
| Jumlah   |   | 7.100.000.000,00    | 1.048.990.397,00  | 2.894.390.327,00       | 15,22                 | -5.201.009.603,00 |                 |                  |                             |        |
| III  |   |                     |                   |                        |                       |                   |                 |                  |                             |        |
| PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   |   |                     |                   |                        |                       |                   |                 |                  |                             |        |
| 1  | Retribusi Pelayanan Kesehatan                 | 10.000.000,00       | 3.276.000,00      | 13.245.000,00          | 15,22                 | 5.523.500,00      | 411.01          | DPKAD            |                             |        |
| 2  | Retribusi Pelayanan Kesehatan Air             | 7.000.000,00        | 5.890.000,00      | 6.500.000,00           | 92,86                 | -500.000,00       | 411.03          | DPKAD            |                             |        |
| 3  | Retribusi Pasar                               | 8.000.000,00        | 6.890.000,00      | 7.500.000,00           | 93,75                 | -500.000,00       | 411.04          | DPKAD            |                             |        |
| 4  | Retribusi Tempat Parkir                       | 10.000.000,00       | 3.276.000,00      | 13.245.000,00          | 15,22                 | 5.523.500,00      | 411.05          | DPKAD            |                             |        |
| 5  | Retribusi Pemungutan Jalan (PPJ)              | 3.400.000.000,00    | 708.70.889,00     | 2.864.613.756,00       | 3,24                  | -2.675.289.111,00 | 411.05.01       | DPKAD            |                             |        |
| 6  | Pajak Mineral Bukan Logam & Batuan            | 1.000.000.000,00    | 856.440.148,00    | 650.397.470,00         | 65,04                 | -349.642.529,00   | 411.06.01       | DPKAD            |                             |        |
| 7  | Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan & Perkotaan | 2.500.000.000,00    | 108.443.328,00    | 1.740.497.81,00        | 7,16                  | -1.739.502.171,00 | 411.07.01       | DPKAD            |                             |        |
| 8  | BNP/B   | 80.000.000,00       | 83.640.000,00     | 73.893.000,00          | 92,23                 | -8.107.000,00     | 411.13.01       | DPKAD            |                             |        |
| Jumlah   |   | 7.100.000.000,00    | 1.048.990.397,00  | 2.894.390.327,00       | 15,22                 | -5.201.009.603,00 |                 |                  |                             |        |
| IV   |   |                     |                   |                        |                       |                   |                 |                  |                             |        |
| PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   |   |                     |                   |                        |                       |                   |                 |                  |                             |        |
| 1  | Retribusi Pelayanan Kesehatan                 | 10.000.000,00       | 3.276.000,00      | 13.245.000,00          | 15,22                 | 5.523.500,00      | 411.01          | DPKAD            |                             |        |
| 2  | Retribusi Pelayanan Kesehatan Air             | 7.000.000,00        | 5.890.000,00      | 6.500.000,00           | 92,86                 | -500.000,00       | 411.03          | DPKAD            |                             |        |
| 3  | Retribusi Pasar                               | 8.000.000,00        | 6.890.000,00      | 7.500.000,00           | 93,75                 | -500.000,00       | 411.04          | DPKAD            |                             |        |
| 4  | Retribusi Tempat Parkir                       | 10.000.000,00       | 3.276.000,00      | 13.245.000,00          | 15,22                 | 5.523.500,00      | 411.05          | DPKAD            |                             |        |
| 5  | Retribusi Pemungutan Jalan (PPJ)              | 3.400.000.000,00    | 708.70.889,00     | 2.864.613.756,00       | 3,24                  | -2.675.289.111,00 | 411.05.01       | DPKAD            |                             |        |
| 6  | Pajak Mineral Bukan Logam & Batuan            | 1.000.000.000,00    | 856.440.148,00    | 650.397.470,00         | 65,04                 | -349.642.529,00   | 411.06.01       | DPKAD            |                             |        |
| 7  | Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan & Perkotaan | 2.500.000.000,00    | 108.443.328,00    | 1.740.497.81,00        | 7,16                  | -1.739.502.171,00 | 411.07.01       | DPKAD            |                             |        |
| 8  | BNP/B   | 80.000.000,00       | 83.640.000,00     | 73.893.000,00          | 92,23                 | -8.107.000,00     | 411.13.01       | DPKAD            |                             |        |
| Jumlah   |   | 7.100.000.000,00    | 1.048.990.397,00  | 2.894.390.327,00       | 15,22                 | -5.201.009.603,00 |                 |                  |                             |        |
| V  |   |                     |                   |                        |                       |                   |                 |                  |                             |        |
| PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   |   |                     |                   |                        |                       |                   |                 |                  |                             |        |
| 1  | Retribusi Pelayanan Kesehatan                 | 10.000.000,00       | 3.276.000,00      | 13.245.000,00          | 15,22                 | 5.523.500,00      | 411.01          | DPKAD            |                             |        |
| 2  | Retribusi Pelayanan Kesehatan Air             | 7.000.000,00        | 5.890.000,00      | 6.500.000,00           | 92,86                 | -500.000,00       | 411.03          | DPKAD            |                             |        |
| 3  | Retribusi Pasar                               | 8.000.000,00        | 6.890.000,00      | 7.500.000,00           | 93,75                 | -500.000,00       | 411.04          | DPKAD            |                             |        |
| 4  | Retribusi Tempat Parkir                       | 10.000.000,00       | 3.276.000,00      | 13.245.000,00          | 15,22                 | 5.523.500,00      | 411.05          | DPKAD            |                             |        |
| 5  | Retribusi Pemungutan Jalan (PPJ)              | 3.400.000.000,00    | 708.70.889,00     | 2.864.613.756,00       | 3,24                  | -2.675.289.111,00 | 411.05.01       | DPKAD            |                             |        |
| 6  | Pajak Mineral Bukan Logam & Batuan            | 1.000.000.000,00    | 856.440.148,00    | 650.397.470,00         | 65,04                 | -349.642.529,00   | 411.06.01       | DPKAD            |                             |        |
| 7  | Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan & Perkotaan | 2.500.000.000,00    | 108.443.328,00    | 1.740.497.81,00        | 7,16                  | -1.739.502.171,00 | 411.07.01       | DPKAD            |                             |        |
| 8  | BNP/B   | 80.000.000,00       | 83.640.000,00     | 73.893.000,00          | 92,23                 | -8.107.000,00     | 411.13.01       | DPKAD            |                             |        |
| Jumlah   |   | 7.100.000.000,00    | 1.048.990.397,00  | 2.894.390.327,00       | 15,22                 | -5.201.009.603,00 |                 |                  |                             |        |
| VI   |   |                     |                   |                        |                       |                   |                 |                  |                             |        |
| PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   |   |                     |                   |                        |                       |                   |                 |                  |                             |        |
| 1  | Retribusi Pelayanan Kesehatan                 | 10.000.000,00       | 3.276.000,00      | 13.245.000,00          | 15,22                 | 5.523.500,00      | 411.01          | DPKAD            |                             |        |
| 2  | Retribusi Pelayanan Kesehatan Air             | 7.000.000,00        | 5.890.000,00      | 6.500.000,00           | 92,86                 | -500.000,00       | 411.03          | DPKAD            |                             |        |
| 3  | Retribusi Pasar                               | 8.000.000,00        | 6.890.000,00      | 7.500.000,00           | 93,75                 | -500.000,00       | 411.04          | DPKAD            |                             |        |
| 4  | Retribusi Tempat Parkir                       | 10.000.000,00       | 3.276.000,00      | 13.245.000,00          | 15,22                 | 5.523.500,00      | 411.05          | DPKAD            |                             |        |
| 5  | Retribusi Pemungutan Jalan (PPJ)              | 3.400.000.000,00    | 708.70.889,00     | 2.864.613.756,00       | 3,24                  | -2.675.289.111,00 | 411.05.01       | DPKAD            |                             |        |
| 6  | Pajak Mineral Bukan Logam & Batuan            | 1.000.000.000,00    | 856.440.148,00    | 650.397.470,00         | 65,04                 | -349.642.529,00   | 411.06.01       | DPKAD            |                             |        |
| 7  | Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan & Perkotaan | 2.500.000.000,00    | 108.443.328,00    | 1.740.497.81,00        | 7,16                  | -1.739.502.171,00 | 411.07.01       | DPKAD            |                             |        |
| 8  | BNP/B   | 80.000.000,00       | 83.640.000,00     | 73.893.000,00          | 92,23                 | -8.107.000,00     | 411.13.01       | DPKAD            |                             |        |
| Jumlah   |   | 7.100.000.000,00    | 1.048.990.397,00  | 2.894.390.327,00       | 15,22                 | -5.201.009.603,00 |                 |                  |                             |        |
| VII  |   |                     |                   |                        |                       |                   |                 |                  |                             |        |
| PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   |   |                     |                   |                        |                       |                   |                 |                  |                             |        |
| 1  | Retribusi Pelayanan Kesehatan                 | 10.000.000,00       | 3.276.000,00      | 13.245.000,00          | 15,22                 | 5.523.500,00      | 411.01          | DPKAD            |                             |        |
| 2  | Retribusi Pelayanan Kesehatan Air             | 7.000.000,00        | 5.890.000,00      | 6.500.000,00           | 92,86                 | -500.000,00       | 411.03          | DPKAD            |                             |        |
| 3  | Retribusi Pasar                               | 8.000.000,00        | 6.890.000,00      | 7.500.000,00           | 93,75                 | -500.000,00       | 411.04          | DPKAD            |                             |        |
| 4  | Retribusi Tempat Parkir                       | 10.000.000,00       | 3.276.000,00      | 13.245.000,00          | 15,22                 | 5.523.500,00      | 411.05          | DPKAD            |                             |        |
| 5  | Retribusi Pemungutan Jalan (PPJ)              | 3.400.000.000,00    | 708.70.889,00     | 2.864.613.756,00       | 3,24                  | -2.675.289.111,00 | 411.05.01       | DPKAD            |                             |        |
| 6  | Pajak Mineral Bukan Logam & Batuan            | 1.000.000.000,00    | 856.440.148,00    | 650.397.470,00         | 65,04                 | -349.642.529,00   | 411.06.01       | DPKAD            |                             |        |
| 7  | Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan & Perkotaan | 2.500.000.000,00    | 108.443.328,00    | 1.740.497.81,00        | 7,16                  | -1.739.502.171,00 | 411.07.01       | DPKAD            |                             |        |
| 8  | BNP/B   | 80.000.000,00       | 83.640.000,00     | 73.893.000,00          | 92,23                 | -8.107.000,00     | 411.13.01       | DPKAD            |                             |        |
| Jumlah   |   | 7.100.000.000,00    | 1.048.990.397,00  | 2.894.390.327,00       | 15,22                 | -5.201.009.603,00 |                 |                  |                             |        |
| VIII   |   |                     |                   |                        |                       |                   |                 |                  |                             |        |
| PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   |   |                     |                   |                        |                       |                   |                 |                  |                             |        |
| 1  | Retribusi Pelayanan Kesehatan                 | 10.000.000,00       | 3.276.000,00      | 13.245.000,00          | 15,22                 | 5.523.500,00      | 411.01          | DPKAD            |                             |        |
| 2  | Retribusi Pelayanan Kesehatan Air             | 7.000.000,00        | 5.890.000,00      | 6.500.000,00           | 92,86                 | -500.000,00       | 411.03          | DPKAD            |                             |        |
| 3  | Retribusi Pasar                               | 8.000.000,00        | 6.890.000,00      | 7.500.000,00           | 93,75                 | -500.000,00       | 411.04          | DPKAD            |                             |        |
| 4  | Retribusi Tempat Parkir                       | 10.000.000,00       | 3.276.000,00      | 13.245.000,00          | 15,22                 | 5.523.500,00      | 411.05          | DPKAD            |                             |        |
| 5  | Retribusi Pemungutan Jalan (PPJ)              | 3.400.000.000,00    | 708.70.889,00     | 2.864.613.756,00       | 3,24                  | -2.675.289.111,00 | 411.05.01       | DPKAD            |                             |        |
| 6  | Pajak Mineral Bukan Logam & Batuan            | 1.000.000.000,00    | 856.440.148,00    | 650.397.470,00         | 65,04                 | -349.642.529,00   | 411.06.01       | DPKAD            |                             |        |
| 7  | Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan & Perkotaan | 2.500.000.000,00    | 108.443.328,00    | 1.740.497.81,00        | 7,16                  | -1.739.502.171,00 | 411.07.01       | DPKAD            |                             |        |
| 8  | BNP/B   | 80.000.000,00       | 83.640.000,00     | 73.893.000,00          | 92,23                 | -8.107.000,00     | 411.13.01       | DPKAD            |                             |        |
| Jumlah   |   | 7.100.000.000,00    | 1.048.990.397,00  | 2.894.390.327,00       | 15,22                 | -5.201.009.603,00 |                 |                  |                             |        |
| IX   |   |                     |                   |                        |                       |                   |                 |                  |                             |        |
| PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   |   |                     |                   |                        |                       |                   |                 |                  |                             |        |
| 1  | Retribusi Pelayanan Kesehatan                 | 10.000.000,00       | 3.276.000,00      | 13.245.000,00          | 15,22                 | 5.523.500,00      | 411.01          | DPKAD            |                             |        |
| 2  | Retribusi Pelayanan Kesehatan Air             | 7.000.000,00        | 5.890.000,00      | 6.500.000,00           | 92,86                 | -500.000,00       | 411.03          | DPKAD            |                             |        |
| 3  | Retribusi Pasar                               | 8.000.000,00        | 6.890.000,00      | 7.500.000,00           | 93,75                 | -500.000,00       | 411.04          | DPKAD            |                             |        |
| 4  | Retribusi Tempat Parkir                       | 10.000.000,00       | 3.276.000,00      | 13.245.000,00          | 15,22                 | 5.523.500,00      | 411.05          | DPKAD            |                             |        |
| 5  | Retribusi Pemungutan Jalan (PPJ)              | 3.400.000.000,00    | 708.70.889,00     | 2.864.613.756,00       | 3,24                  | -2.675.289.111,00 | 411.05.01       | DPKAD            |                             |        |
| 6  | Pajak Mineral Bukan Logam & Batuan            | 1.000.000.000,00    | 856.440.148,00    | 650.397.470,00         | 65,04                 | -349.642.529,00   | 411.06.01       | DPKAD            |                             |        |
| 7  | Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan & Perkotaan | 2.500.000.000,00    | 108.443.328,00    | 1.740.497.81,00        | 7,16                  | -1.739.502.171,00 | 411.07.01       | DPKAD            |                             |        |
| 8  | BNP/B   | 80.000.000,00       | 83.640.000,00     | 73.893.000,00          | 92,23                 | -8.107.000,00     | 411.13.01       | DPKAD            |                             |        |
| Jumlah   |   | 7.100.000.000,00    | 1.048.990.397,00  | 2.894.390.327,00       | 15,22                 | -5.201.009.603,00 |                 |                  |                             |        |
| X  |   |                     |                   |                        |                       |                   |                 |                  |                             |        |
| PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   |   |                     |                   |                        |                       |                   |                 |                  |                             |        |
| 1  | Retribusi Pelayanan Kesehatan                 | 10.000.000,00       | 3.276.000,00      | 13.245.000,00          | 15,22                 | 5.523.500,00      | 411.01          | DPKAD            |                             |        |
| 2  | Retribusi Pelayanan Kesehatan Air             | 7.000.000,00        | 5.890.000,00      | 6.500.000,00           | 92,86                 | -500.000,00       | 411.03          | DPKAD            |                             |        |
| 3  | Retribusi Pasar                               | 8.000.000,00        | 6.890.000,00      | 7.500.000,00           | 93,75                 | -500.000,00       | 411.04          | DPKAD            |                             |        |
| 4  | Retribusi Tempat Parkir                       | 10.000.000,00       | 3.276.000,00      | 13.245.000,00          | 15,22                 | 5.523.500,00      | 411.05          | DPKAD            |                             |        |
| 5  | Retribusi Pemungutan Jalan (PPJ)              | 3.400.000.000,00    | 708.70.889,00     | 2.864.613.756,00       | 3,24                  | -2.675.289.111,00 | 411.05.01       | DPKAD            |                             |        |
| 6  | Pajak Mineral Bukan Logam & Batuan            | 1.000.000.000,00    | 856.440.148,00    | 650.397.470,00         | 65,04                 | -349.642.529,00   | 411.06.01       | DPKAD            |                             |        |
| 7  | Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan & Perkotaan | 2.500.000.000,00    | 108.443.328,00    | 1.740.497.81,00        | 7,16                  | -1.739.502.171,00 | 411.07.01       | DPKAD            |                             |        |
| 8  | BNP/B   | 80.000.000,00       | 83.640.000,00     | 73.893.000,00          | 92,23                 | -8.107.000,00     | 411.13.01       | DPKAD            |                             |        |

| LAPORAN TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG<br>SAMPAI DENGAN BULAN DESEMBER 2017 (JITELAN PERUBAHAN) |  |                          |                         |                          |                            |              |                        |                 |                        |                                 |
|--|--|--------------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------|------------------------|-----------------|------------------------|---------------------------------|
| NO   | JEMIS<br>PEMBAYARAN                              | TARGET 2017<br>(Rp)      | R E A L I S A S I       |                          |                            |              | %                      | SELISIH<br>(Rp) | KODE<br>REKENING       | KETERANGAN<br>(LEAD KETERANGAN) |
|  |  |                          | BULAN INI<br>d          | JTD BULAN LALU<br>g      | JTD BULAN INI<br>g (d + g) | f            |                        |                 |                        |                                 |
| 1  | <b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>              |                          |                         |                          |                            |              |                        |                 |                        |                                 |
| <b>A</b>   | <b>PAJAK DAERAH</b>                              |                          |                         |                          |                            |              |                        |                 |                        |                                 |
| 1  | Pajak Hotel                                      | 12.000.000,00            | 1.247.000,00            | 15.954.500,00            | 17.201.500,00              | 143,35       | 5.201.500,00           | 4.1.1           | Bopenda                |                                 |
| 2  | Pajak Restoran                                   | 50.000.000,00            | 11.896.000,00           | 42.057.000,00            | 53.954.000,00              | 107,91       | 3.954.000,00           | 4.1.1.01.01     | Bopenda                |                                 |
| 3  | Pajak Hiburan                                    | 15.000.000,00            | 0,00                    | 3.000.000,00             | 3.000.000,00               | 20,67        | -1.900.000,00          | 4.1.1.03        | Bopenda                |                                 |
| 4  | Pajak Reklame                                    | 88.000.000,00            | 101.148.700,00          | 76.830.400,00            | 177.979.100,00             | 202,25       | 89.979.100,00          | 4.1.1.04        | Bopenda                |                                 |
| 5  | Pajak Penjualan Jalan (PPJ)                      | 4.300.000.000,00         | 379.857.144,00          | 3.787.137.445,00         | 4.166.994.589,00           | 96,91        | -133.005.411,00        | 4.1.1.05.01     | Bopenda                |                                 |
| 6  | Pajak Mineral Bukan Logam & Batuan               | 3.500.000.000,00         | 315.763.416,00          | 1.375.370.045,00         | 1.691.135.461,00           | 67,65        | -409.866.537,00        | 4.1.1.05.06     | Bopenda                |                                 |
| 7  | Pajak Parkir                                     | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                       | 0,00         | 0,00                   |                 |                        |                                 |
| 8  | Pajak Air Tanah                                  | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                       | 0,00         | 0,00                   |                 |                        |                                 |
| 9  | Pajak Sarang Burung Walet                        | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                       | 0,00         | 0,00                   |                 |                        |                                 |
| 10   | Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan & Perkotaan    | 2.600.000.000,00         | 1.013.382.542,00        | 1.482.830.395,00         | 2.496.212.433,00           | 96,01        | -103.787.567,00        | 4.1.1.01.01     | Bopenda                |                                 |
| 11   | Pajak BHTB                                       | 400.000.000,00           | 39.850.000,00           | 376.397.495,00           | 416.247.495,00             | 104,06       | 16.247.495,00          | 4.1.1.01.01     | Bopenda                |                                 |
|  | <b>Jumlah 1. A</b>                               | <b>9.063.000.000,00</b>  | <b>1.663.144.364,00</b> | <b>7.599.677.376,00</b>  | <b>9.033.621.589,00</b>    | <b>99,25</b> | <b>-943.178.429,00</b> |                 |                        |                                 |
| <b>B</b>   | <b>RETRIBUSI DAERAH</b>                          |                          |                         |                          |                            |              |                        |                 |                        |                                 |
| <b>1. RETRIBUSI JAJA UMUM:</b>   |  | <b>25.324.000.000,00</b> | <b>5.816.500.000,00</b> | <b>15.476.600.852,00</b> | <b>19.312.100.432,00</b>   | <b>68,98</b> |                        |                 |                        |                                 |
| 1  | Retribusi Pelayanan Kesehatan                    | 27.177.815.062,00        | 5.688.574.800,00        | 12.671.624.652,00        | 18.360.18.452,00           | 67,56        | -8.877.633.610,00      | 4.1.2.01.01     | RLSD                   |                                 |
| -  | Retribusi Pelayanan Kesehatan di RSUD            | 24.587.815.062,00        | 4.787.157.800,00        | 10.204.11.151,00         | 15.823.328.992,00          | 64,38        |                        |                 |                        | Dinas                           |
| -  | Insentif Kesehatan Nasional                      | 1.870.000.000,00         | 649.257.000,00          | 977.397.500,00           | 1.626.694.500,00           | 97,68        |                        |                 |                        | Dinas                           |
| -  | Pemeriksaan Kualitas Air                         | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                       | 0,00         |                        |                 |                        | Dinas                           |
| -  | Pelayanan Kesehatan di Puskesmas & Jaringannya   | 720.000.000,00           | 52.120.000,00           | 688.238.000,00           | 710.158.000,00             | 98,63        |                        |                 |                        | Dinas                           |
| 2  | Retribusi Pelayanan Pasar                        | 1.023.200.000,00         | 138.610.500,00          | 923.486.000,00           | 1.064.096.500,00           | 104,00       | 40.896.500,00          | 4.1.2.01.06     | Dinas Pertanian        |                                 |
| -  | Pelayanan Pasar                                  | 23.200.000,00            | 3.060.000,00            | 30.080.000,00            | 33.140.000,00              |              |                        |                 |                        | Dinas Pertanian                 |
| 3  | Ret. Pengangkutan Kendaraan Bermotor (PKB)       | 1.006.000.000,00         | 135.550.000,00          | 895.406.000,00           | 1.030.956.500,00           |              |                        |                 |                        | Dinas Perhubungan               |
| 4  | Ret. Terminal (TDR)                              | 20.000.000,00            | 1.710.000,00            | 24.453.000,00            | 25.723.000,00              | 102,89       | 723.000,00             | 4.1.2.01.07     | Perhubungan            |                                 |
| 5  | Ret. Jasa Usaha (Kebun Raya)                     | 40.000.000,00            | 6.335.000,00            | 35.300.000,00            | 21.467.500,00              | 107,34       | 1.467.500,00           | 4.1.2.01.23     | Dinas LH               |                                 |
| <b>2. RETRIBUSI JAJA UMUM:</b>   |  | <b>1.688.000.000,00</b>  | <b>425.389.899,00</b>   | <b>576.788.899,00</b>    | <b>649.897.899,00</b>      | <b>97,18</b> |                        |                 |                        |                                 |
| 1  | Ret. Pemeliharaan Kelayakan Daerah               | 720.000.000,00           | 331.085.000,00          | 377.945.000,00           | 869.030.000,00             | 120,70       | 149.030.000,00         | 4.1.2.01.01     | Dinas PU               |                                 |
| -  | Sewa Alat Berat & Alat Laboratorium              | 520.000.000,00           | 247.710.000,00          | 449.070.000,00           | 696.780.000,00             |              |                        |                 |                        | Dinas PU                        |
| -  | Sewa Alat Berat                                  | 175.800.000,00           | 175.800.000,00          | 259.450.000,00           | 435.235.000,00             |              |                        |                 |                        |                                 |
| -  | Sewa Alat Laboratorium                           | 344.200.000,00           | 71.910.000,00           | 389.620.000,00           | 261.535.000,00             |              |                        |                 |                        |                                 |
| -  | Retribusi Mobil STA                              | 50.000.000,00            | 10.000.000,00           | 25.000.000,00            | 39.000.000,00              |              | -1.000.000,00          |                 |                        | Dinas Pertanian                 |
| -  | Sewa Rumah Dinas                                 | 70.000.000,00            | 41.200.000,00           | 15.800.000,00            | 57.000.000,00              |              | -13.000.000,00         |                 |                        | Bopenda                         |
| -  | Sewa Kamar SIB                                   | 30.000.000,00            | 22.475.000,00           | 13.375.000,00            | 36.290.000,00              |              | -6.290.000,00          |                 |                        | Dinas Pendidikan                |
| -  | Retribusi Pemeliharaan Kelayakan Daerah di Setda | 30.000.000,00            | 14.500.000,00           | 7.500.000,00             | 22.000.000,00              |              | -4.000.000,00          |                 |                        | Setda                           |
| -  | Retribusi Pemeliharaan Daerah di RSUD            | 20.000.000,00            | 15.000.000,00           | 3.000.000,00             | 18.000.000,00              |              |                        |                 |                        | RSUD                            |
| 2  | Ret. Parkir                                      | 220.000.000,00           | 22.754.000,00           | 25.177.000,00            | 27.487.000,00              | 124,94       | 54.871.000,00          |                 |                        |                                 |
| Ret. Tempat Khusus Parkir Perhubungan  |  | 95.000.000,00            | 22.475.000,00           | 22.377.000,00            | 24.671.000,00              | 128,18       |                        |                 |                        | Perhubungan                     |
| Ret. Tempat Relokasi & Olah Raga   |  | 25.000.000,00            | 22.754.000,00           | 30.800.000,00            | 30.800.000,00              | 0,00         |                        |                 |                        |                                 |
| Ret. Transportasi & Olah Raga  |  | 400.000.000,00           | 49.000.000,00           | 225.470.000,00           | 274.470.000,00             | 68,62        | -125.530.000,00        | 4.1.2.01.10     | Dinas Kap & Perikanan  |                                 |
| 3  | Ret. Pengangkutan Biaya Benih Ikan               | 160.000.000,00           | 6.400.000,00            | 179.385.000,00           | 186.385.000,00             | 117,87       | 26.385.000,00          | 4.1.2.01.17     | D.Peternakan&Perikanan |                                 |

| LAPORAN TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG<br>SAMPAI BULAN DESEMBER 2014 (APBD-P) |   |                     |                   |                     |                            |        |                   |                 |                        |                                 |
|--|---|---------------------|-------------------|---------------------|----------------------------|--------|-------------------|-----------------|------------------------|---------------------------------|
| NO   | JEMIS<br>PEMBAYARAN                           | TARGET 2014<br>(Rp) | R E A L I S A S I |                     |                            |        | %                 | SELISIH<br>(Rp) | KODE<br>REKENING       | KETERANGAN<br>(LEAD KETERANGAN) |
|  |   |                     | BULAN INI<br>d    | JTD BULAN LALU<br>g | JTD BULAN INI<br>g (d + g) | f      |                   |                 |                        |                                 |
| 1  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                  | 57.445.38.756,00    | 9.379.299.819,59  | 34.645.33.439,13    | 31.945.145.644,43          | 99,18  | -3.694.018.137,37 |                 |                        |                                 |
| A  | PAJAK DAERAH                                  |                     |                   |                     |                            |        |                   |                 |                        |                                 |
| 1  | Pajak Hotel                                   | 7.500.000,00        | 1.503.000,00      | 9.185.500,00        | 10.683.500,00              | 142,45 | 3.183.500,00      | 4.1.01          | DKHAD                  |                                 |
| 2  | Pajak Restoran                                | 47.000.000,00       | 10.841.000,00     | 43.815.000,00       | 54.656.000,00              | 166,29 | 7.656.000,00      | 4.1.01.01       | DKHAD                  |                                 |
| 3  | Pajak Hiburan                                 | 5.000.000,00        | 0,00              | 5.475.000,00        | 5.475.000,00               | 109,50 | 475.000,00        | 4.1.03          | DKHAD                  |                                 |
| 4  | Pajak Reklame                                 | 83.000.000,00       | 39.418.500,00     | 68.369.500,00       | 107.788.425,00             | 129,87 | 24.788.425,00     | 4.1.04          | DKHAD                  |                                 |
| 5  | Pajak Penjualan jalan (PPJ)                   | 2.810.000.000,00    | 252.970.733,00    | 2.550.875.975,00    | 2.803.455.708,00           | 99,77  | -6.544.292,00     | 4.1.05.01       | DKHAD                  |                                 |
| 6  | Pajak Mineral Bukan Logam & Batuan            | 300.000.000,00      | 627.743.151,00    | 357.546.404,00      | 1.045.289.555,00           | 209,06 | 545.289.555,00    | 4.1.06.06       | DKHAD                  |                                 |
| 7  | Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan & Perkotaan | 1.900.000.000,00    | 295.146.865,00    | 1.688.047.750,00    | 1.983.194.625,00           | 104,38 | 83.194.625,00     | 4.1.11.01       | DKHAD                  |                                 |
| 8  | BHTB  | 65.000.000,00       | 2.000.000,00      | 59.165.796,00       | 61.165.796,00              | 94,10  | -3.834.204,00     | 4.1.11.01       | DKHAD                  |                                 |
|  | Jumlah  | 5.677.500.000,00    | 1.589.431.289,59  | 6.783.377.369,59    | 6.071.766.609,43           | 103,68 | 654.268.409,43    |                 |                        |                                 |
| B  | RETRIBUSI DAERAH                              |                     |                   |                     |                            |        |                   |                 |                        |                                 |
| A  | RETRIBUSI JAJA UMUM                           | 20.742.639.862,00   | 4.464.997.377,00  | 17.093.745.751,00   | 19.700.733.239,00          | 94,41  |                   |                 |                        |                                 |
| 1  | Retribusi Pelayanan Kesehatan                 | 19.964.178.961,00   | 4.565.258.764,00  | 6.203.360.358,00    | 10.768.619.122,00          | 53,94  | -9.195.559.841,00 | 4.1.2.01.01     | DINKE&RSUD             |                                 |
| 2  | Ret. Pemeriksaan Kualitas Air                 | 5.000.000,00        | 0,00              | 5.505.200,00        | 5.505.200,00               | 110,10 | 505.200,00        | 4.1.2.01.01     | DINKE&                 |                                 |
| 3  | Ret. Peng. Biaya Cetak KTP                    | 5.000.000,00        | 0,00              | 4.865.000,00        | 4.865.000,00               | 97,30  | -135.000,00       | 4.1.2.01.03     | DINOS& CAPIL           |                                 |
| 4  | Ret. Peng. Biaya Cetak HK                     | 2.000.000,00        | 0,00              | 1.500.000,00        | 1.500.000,00               | 75,00  | -500.000,00       | 4.1.2.01.04     | DINOS& CAPIL           |                                 |
| 5  | Retribusi Pasar                               | 643.450.000,00      | 111.223.500,00    | 664.840.250,00      | 775.963.750,00             | 120,59 | 132.513.750,00    | 4.1.2.01.06     | Perikanan&Perikanan    |                                 |
| 6  | Ret. Pengangkutan Kendaraan Bermotor (PKB)    | 20.000.000,00       | 1.200.000,00      | 13.424.000,00       | 14.624.000,00              | 73,12  | -5.375.400,00     | 4.1.2.01.07     | DISHUB INBUPAR         |                                 |
| 7  | Retribusi Tempat Parkir                       | 100.000.000,00      | 12.386.000,00     | 107.135.000,00      | 119.521.000,00             | 119,52 | 19.521.000,00     | 4.1.2.01.11     | DISHUB INBUPAR         |                                 |
| 8  | Ret. Pem. Koperasi UTP                        | 3.000.000,00        | 5.019.313,30      | 5.185.343,30        | 10.134.657,00              | 337,82 | 7.134.657,00      | 4.1.2.02.08     | D.Peternakan&Perikanan |                                 |
| B  | RETRIBUSI JAJA UMUM                           | 824.969.000,00      | 289.074.000,00    | 609.370.000,00      | 699.444.000,00             | 106,97 |                   |                 |                        |                                 |
| 1  | Ret. Pemeliharaan Kelayakan Daerah            | 372.000.000,00      | 261.035.000,00    | 477.385.000,00      | 678.220.000,00             | 188,37 | 106.220.000,00    | 4.1.2.01.01     | DISHUB&INEC&Cap.Din.   |                                 |
| 2  | Ret. Terminal (TDR)                           | 40.000.000,00       | 9.714.000,00      | 41.82.000,00        | 46.876.000,00              | 117,19 | 6.876.000,00      | 4.1.2.01.05     | DISHUB INBUPAR         |                                 |
| 3  | Ret. Tempat Relokasi & Olah Raga              | 150.000.000,00      | 9.300.000,00      | 73.598.998,00       | 84.898.998,00              | 56,60  | -65.103.002,00    | 4.1.2.01.10     | DISHUB INBUPAR         |                                 |
| 4  | Ret. Pengangkutan Biaya Benih Ikan            | 45.000.000,00       | 9.100.000,00      | 33.099.000,00       | 64.190.000,00              | 142,64 | 19.190.000,00     | 4.1.2.01.17     | D.Peternakan&Perikanan |                                 |
| 5  | Ret. Kebun Raya Masipul                       | 17.500.000,00       | 3.925.000,00      | 20.335.000,00       | 24.260.000,00              | 138,63 | 6.760.000,00      | 4.1.2.01.23     | D.Kebudayaan           |                                 |

**8. Foto dari depan Kantor BAPENDA (Badan Pendapatan Daerah) Kabupaten Enrekang**

